

BAB 3

STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA DI SELAT MALAKA

PERIODE 2006-2008

Power suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kapabilitas militer yang dimiliki negara tersebut.¹⁶³ Pada umumnya, kapabilitas militer yang dimiliki negara dapat digunakan sebagai alat pertahanan atau sebagai alat peperangan. James Wyllie menegaskan bahwa militer merupakan variabel yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menganalisis keamanan nasional.¹⁶⁴

Pada umumnya, kapabilitas militer Indonesia selama kurun waktu 2006-2008 mengalami penurunan dan stagnansi dalam berbagai segi. Hal tersebut dapat dilihat dari segi anggaran pertahanan, *Manpower* dan juga alat utama sistem persenjataan yang dimiliki Indonesia.

Bab ini akan menguraikan dan mengukur secara jelas mengenai strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka melalui persediaan kapabilitas militer, dan juga berbagai macam pola strategi pertahanan yang dilakukan Indonesia sehingga dapat dikategorikan menjadi *balancing*, *bandwagoning* atau *hedging*.

3.1 Kapabilitas Militer Indonesia Periode 2006 – 2008

Pada setiap penyelenggaraan pertahanan negara, ancaman dapat datang dalam berbagai bentuk yang pada akhirnya akan menyita perhatian utama. Pasalnya, ancaman tersebut dapat berakibat langsung terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, setiap negara, termasuk Indonesia dengan kondisi geografis yang dimilikinya, memerlukan strategi pertahanan yang efektif, terutama terhadap beberapa wilayah vital seperti Selat Malaka.

Dengan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar berupa kepulauan, maka sejak dulu telah diperhitungkan bahwa pentingnya pengelaran

¹⁶³ Lihat 'Power' oleh Roger Carey dalam *Issues in International Relations (2nd Edition)*. Trevor C. Salmon and Mark F. Imber (Ed). 2008. London: Routledge. Hal 62.

¹⁶⁴ *Ibid.* Hal 72.

angkatan laut yang besar dan modern.¹⁶⁵ Untuk mengetahui strategi pertahanan yang dipilih Indonesia dalam meningkatkan keamanan di Selat Malaka, maka harus diketahui juga kapabilitas militer di Selat Malaka secara khusus, dan pada umumnya di Indonesia. Akan tetapi, menurut Henry Xu Ke, kapabilitas militer Indonesia, khususnya keamanan maritim Indonesia memiliki kekurangan dalam hal *Money (budget)*, *Manpower (personnel)*, *Machines (ships)*, dan *Methods (skills and training)*.¹⁶⁶ Dalam hal *money*, Indonesia masih memiliki kelemahan akan terbatasnya anggaran pertahanan.¹⁶⁷

Para pemikir klasik seperti Thucydies dan Pericles mengaitkan *power* dengan kapabilitas militer yang dimiliki suatu negara. Para ahli hubungan internasional di abad ke-20 seperti Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz juga mengaitkan *power* negara dengan kapabilitas militer.¹⁶⁸ Secara tradisional, kekuatan militer dapat digunakan untuk memaksakan satu kehendak terhadap kekuatan lainnya, atau untuk melawan kekuatan lainnya.¹⁶⁹ Sebuah negara dapat bertahan terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial yang terpuruk, tapi kegagalan dalam memelihara dan memproyeksikan militer yang kuat akan dapat membahayakan keamanan negara tersebut.¹⁷⁰

Tolak ukur daya nasional (*Power*) suatu negara adalah kapabilitas militer.¹⁷¹ Pasalnya, negara selalu berada dalam suatu lingkungan yang menghadapi ancaman baik internal maupun eksternal. Melalui militer negara dapat mempertahankan dirinya untuk melawan semua saingannya, untuk membantu negara mencapai kepentingannya, dan juga sebagai alat persaingan

¹⁶⁵ The Military Balance 2007. *The International Institute for Strategic Studies*. 6 Juni 2006. Londong: Routledge. Hal 255.

¹⁶⁶ Hal ini dituliskan oleh Dr Henry Xu Ke dalam *The Indonesian New Maritime Security Proposal* yang dimuat di *Maritime Monitor*. 2007. Hal 13-14.

¹⁶⁷ *Ibid.* Hal 4

¹⁶⁸ Lihat '*Power*' oleh Roger Carey dalam Trevor C. Salmon (eds). *Issues in International Relations: 2ns edition*. 2008. London: Routlegde. Hal 62.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Lihat Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson. 2001. 'Measuring Capability' dalam *Measuring National Power in the Post Industrial Age*. Santa Monica: Rand Corporation. Hal 133

dengan negara lainnya. Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan Peter Baret dalam *Military Power*,¹⁷² bahwa:

”military power expresses and implements the power of the state in a variety of ways within and beyond the state borders, and is also one of the instruments with which political power is originally created and made permanent”

(kekuatan militer menunjukkan dan mengimplementasikan *power* negara dalam berbagai cara, baik ke dalam dan keluar batas negara, dan juga merupakan salah satu alat kekuasaan politik yang biasanya diciptakan dan dibuat permanen dengan kekuasaan politik)

Oleh karena itu, untuk membentuk suatu kapabilitas militer yang memadai maka diperlukan tiga hal, yaitu *defense budget*, *manpower*, *military infrastructure*.¹⁷³ Pada umumnya, besaran anggaran pertahanan dapat diukur sesuai dengan sumber daya politiknya. Pasalnya, besarnya anggaran pertahanan menandakan kepentingan yang relatif dari *coercive arm* dibandingkan dengan badan-badan yang lain dari negara bagian, dan hal tersebut juga menunjukkan secara umum besarnya pencapaian militer secara absolut.¹⁷⁴ Selain itu, *defence budget* dapat dibandingkan dengan persentase GDP.

Lalu, ada faktor *manpower* yang dapat dilihat dari segi seberapa besar ukuran yang tepat untuk di suatu wilayah sesuai dengan jumlah penduduk. Kualitas dan kuantitas *military manpower* merupakan sumber daya kedua yang digunakan untuk mengukur kapabilitas pertahanan. Jumlah kekuatan militer sangat penting karena sebagai *crude index* akan kekuatan militer, dan juga dalam berbagai medan pertempuran, kuantitas menentukan kualitas.¹⁷⁵

Berikutnya, masih ada *military infrastructure* yang dalam hal ini dapat dilihat dari persediaan alat utama sistem persenjataan dan juga teknologi yang didistribusikan berdasarkan kebutuhan setiap wilayah.¹⁷⁶ Alat utama sistem

¹⁷² Lihat Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson. 2001. ‘Measuring Capability’ dalam *Measuring National Power in the Post Industrial Age*. Santa Monica: Rand Corporation. Hal 133

¹⁷³ *Ibid.* Hal 134-137.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.* Hal 138.

¹⁷⁶ *Ibid.* Hal 137.

persenjataan yang dimiliki suatu negara dapat diukur dengan merujuk pada jumlah *tanks, battleships, battalions, submarines*, dan alat-alat lainnya yang berkaitan.¹⁷⁷

Bagian ini akan menganalisis mengenai kapabilitas militer Indonesia dan perkembangannya mulai dari tahun 2006 hingga 2008, pada khususnya di Selat Malaka, dan Indonesia pada umumnya.

3.1.1 Anggaran Pertahanan Indonesia Periode 2006-2008

Penyelenggaraan pertahanan suatu negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan. Bagi Indonesia, penentuan jumlah anggaran pertahanan banyak didasarkan pada faktor kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan.¹⁷⁸ Selama kurun waktu 2006 hingga 2008, anggaran pertahanan (*defence budget*) Indonesia mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2007 dan penurunan pada tahun 2008, seperti yang terlihat pada Grafik 3.1.



Grafik 3.1 Anggaran Pertahanan Indonesia 2006-2008

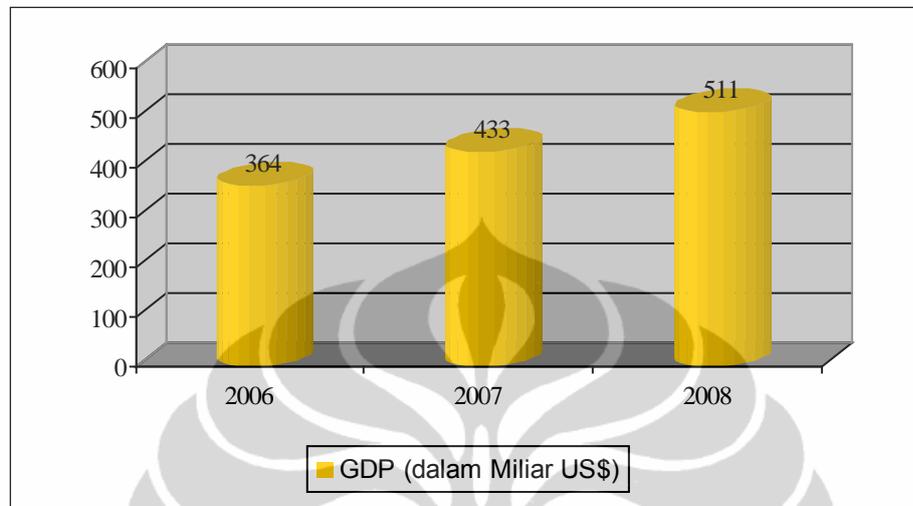
(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2008-2010*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

Pada umumnya, meskipun GDP Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, tapi anggaran pertahanan belum mengalami hal yang serupa. Untuk mengetahui persentase besaran anggaran pertahanan dapat membandingkannya

¹⁷⁷ Lihat 'Power' oleh Roger Carey dalam Trevor C. Salmon (eds). *Issues in International Relations: 2ns edition*. 2008. London: Routledge. Hal 63.

¹⁷⁸ Lihat *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. 2008. Departemen Pertahanan. Hal 163.

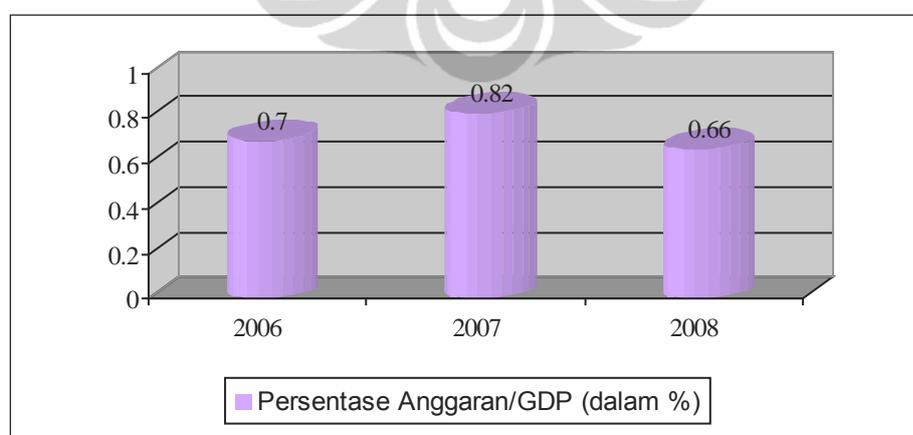
dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Dapat dilihat pada Grafik 3.2, Produk Domestik Bruto Indonesia mengalami kenaikan setiap tahun selama kurun waktu 2006 hingga 2008.



Grafik 3.2 *Gross Domestic Product* Indonesia Periode 2006-2008

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2008-2010*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

Akan tetapi, besaran anggaran pertahanan yang diukur dari nilai *Gross Domestic Product* (GDP) selama periode 2006-2008, masih berada dibawah 1% seperti dapat dilihat pada Grafik 3.3.

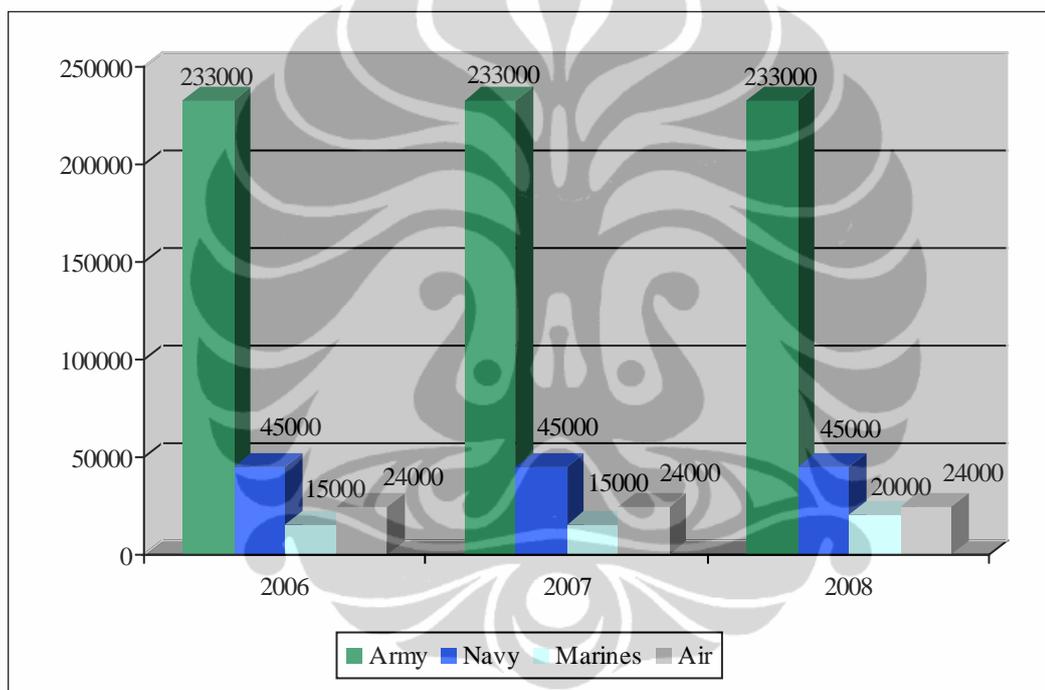


Grafik 3.3 Persentase Anggaran Pertahanan terhadap GDP (2006-2008)

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2008-2010*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

3.1.2 Manpower Indonesia Periode 2006-2008

Pada dasarnya, mengukur kekuatan militer juga dapat dilihat dari *total force* yang dibagi menjadi *active* dan *reserve component*.¹⁷⁹ Bagi Indonesia, kekuatan *manpower* dibagi kedalam tiga matra, yaitu darat (*army*), laut (*navy*) termasuk *marines*, dan udara (*air*) dengan total *active force* selama periode 2006-2008 sebesar 317.000 personel. Meski Indonesia berbentuk kepulauan dengan wilayah perairan yang lebih luas dibanding daratan, tapi Indonesia lebih banyak mempunyai *active force* dalam matra darat dibanding matra laut.

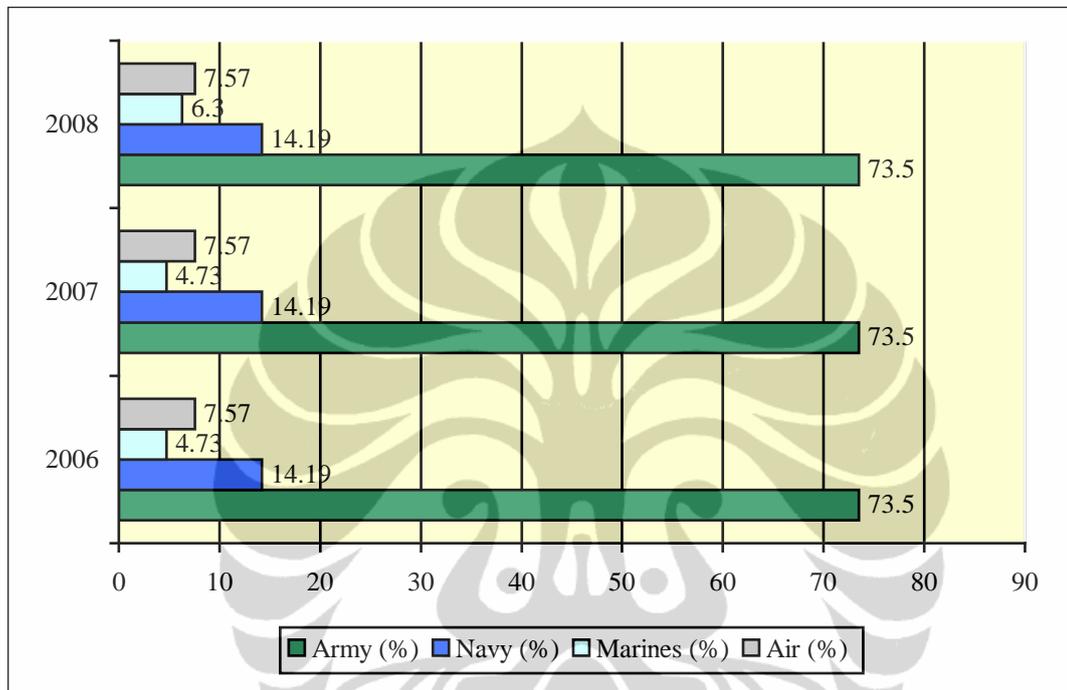


Grafik 3.4 Manpower Indonesia di setiap matra Periode 2006-2008

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2006-2008*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

¹⁷⁹ Lihat Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson. 2001. 'Measuring Capability' dalam *Measuring National Power in the Post Industrial Age*. Santa Monica: Rand Corporation. Hal 138.

Dengan jumlah *active force* angkatan darat yang melebihi angkatan laut hingga lima kali lipat dan angkatan udara hampir sepuluh kali lipat, maka secara otomatis, persentase *active force* lebih berpihak pada matra darat dibanding dua matra lainnya. Lebih dari 70% *active force* didominasi oleh angkatan darat, seperti dapat dilihat pada Grafik 3.5.



Grafik 3.5 Persentase *Manpower* Indonesia di setiap Matra Periode 2006-2008

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2006-2008*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

3.1.3 Alat Utama Sistem Persenjataan Indonesia Periode 2006-2008

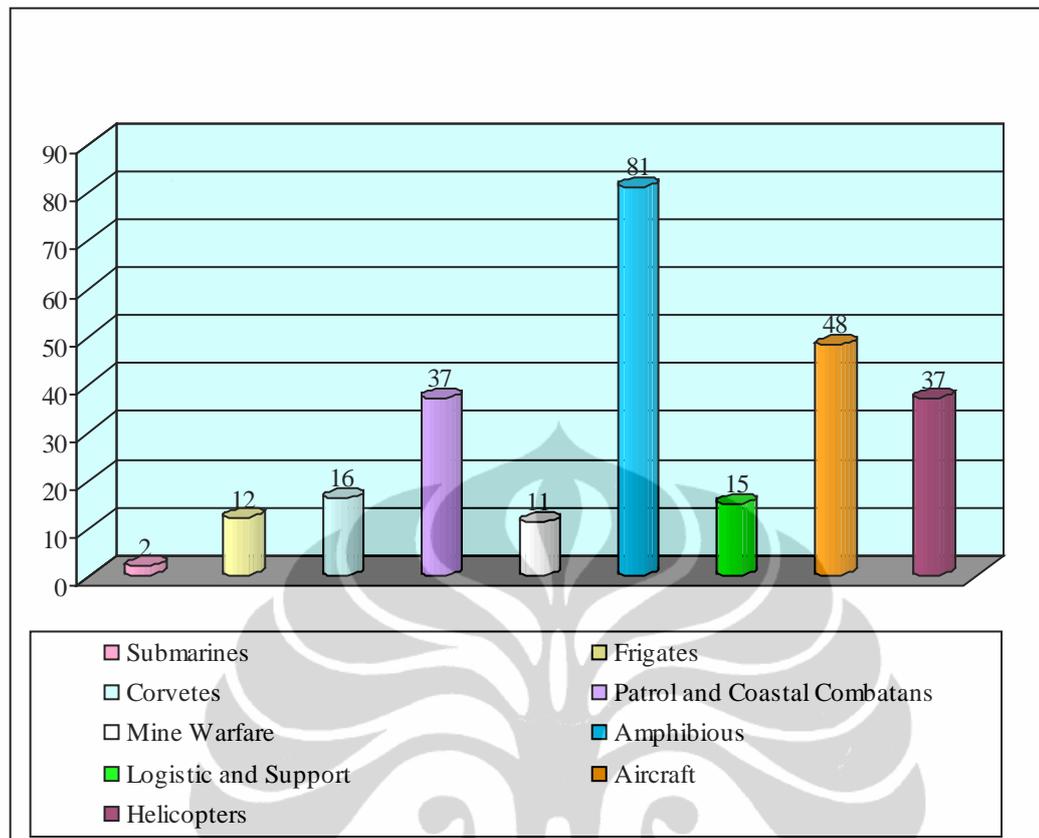
Alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kapabilitas militer suatu negara karena berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk melakukan serangan dan bertahan. Pengukuran alutsista suatu negara dapat dilakukan dengan melihat peralatan yang dimiliki

matra serta melihat pengembangan yang dilakukan oleh tiap matra setiap tahunnya.

Pada bagian ini, alat utama sistem persenjataan akan dijelaskan melalui masing-masing matra, yaitu laut, darat dan udara. Terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai alutsista dari matra laut.

Alat utama sistem persenjataan Indonesia untuk angkatan laut dibagi menjadi sembilan kelompok. Pada tahun 2006, pertama yaitu *Submarines* atau kapal selam dengan jumlah 2 unit. Kedua yaitu *Frigates* yang berjumlah 12 unit terdiri dari 10 *frigate guided missile* dan 2 *frigate*. Ketiga yaitu *Corvetes* sebanyak 16 unit. Kelompok keempat yaitu, *Patrol and Coastal Combatans* sebanyak 37 unit yang terdiri dari 21 *patrol craft coastal*, 4 *fast patrol craft with surface to surface missile*, 4 *patrol craft torpedo*, dan 8 *patrol craft offshore*. Lalu, kelompok kelima, yaitu *Mine Warfare* sebanyak 11 unit yang terdiri dari 3 *mine countermeasure coastal* dan 8 *mine sweeper coastal*.

Selanjutnya, kelompok keenam *Amphibious* dengan jumlah sebanyak 81 unit yang terdiri atas 1 *landing platform dock* di Tanjung Dalpele, 26 *landing ship tank* dan 54 *landing craft utility*). Kelompok ketujuh yaitu berupa *Logistic and Support* sebanyak 15 unit yang terdiri atas 6 *oceanographic research vessel*, 2 *tanker with RAS capability*, 2 *tanker*, 1 *repair ship*, 2 *tug ocean going*, 1 *presidential yacht* dan 1 *support*). Kelompok kedelapan, yaitu *Aircraft* sebanyak 48 unit dengan 27 *maritime patrol*, 15 *transport* dan 6 *training*. Terakhir, kelompok kesembilan, *Helicopters* sejumlah 37 unit dengan (9 *anti sub-marine warfare*, 6 *support*, 22 *utility*). Kelompok ini seperti disimpulkan dalam Grafik 3.6.

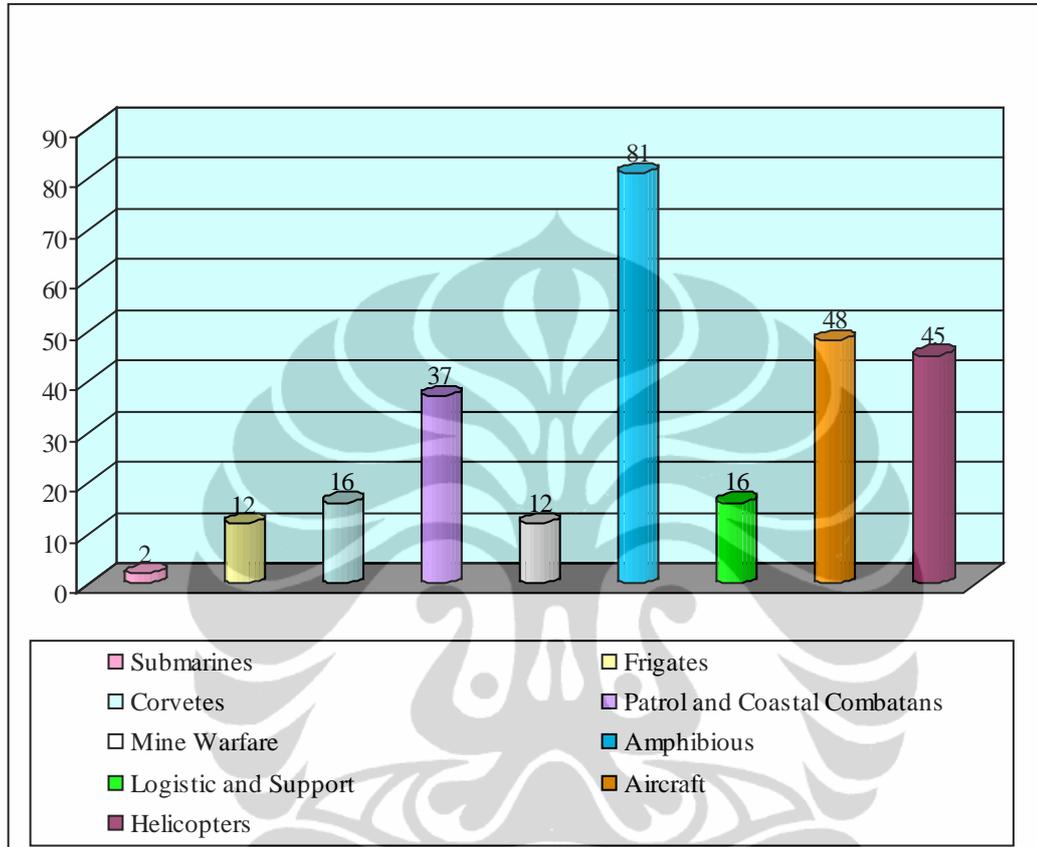


Grafik 3.6 Alutsista Angkatan Laut Indonesia Tahun 2006

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2006*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

Beranjak pada tahun 2007, jumlah alutsista angkatan laut Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Beberapa alutsista tidak mengalami perubahan, yaitu yang pertama *Frigates* sebanyak 12 unit, kedua yaitu *Corvetes* sebanyak 16 unit. Lalu ketiga, *Patrol and Coastal Combatants* sebanyak 37 unit, *Amphibious* sebanyak 81 unit, dan *Aircraft* sebanyak 48 unit. Sedangkan alutsista yang mengalami peningkatan berupa *Mine Warfare* dengan jumlah menjadi 12 unit yang terdiri dari 3 unit *mine countermeasure coastal* dan 9 unit *mine sweeper coastal*. Lalu kedua, yaitu *Logistic and Support* yang menjadi 16 unit terdiri atas 7 unit *oceanographic research vessel*, 2 unit *tanker with RAS capability*, 2 *tanker*, 1 *repair ship*, 2 *tug ocean going*, 1 *presidential yacht* dan 1 *support*. Berikutnya ada juga *Helicopters* yang menjadi sebanyak 45 unit terdiri dari 9 unit *anti sub-*

marine warfare, 14 unit *support*, dan 22 unit *utility*. Seperti yang terlihat pada Grafik 3.7.

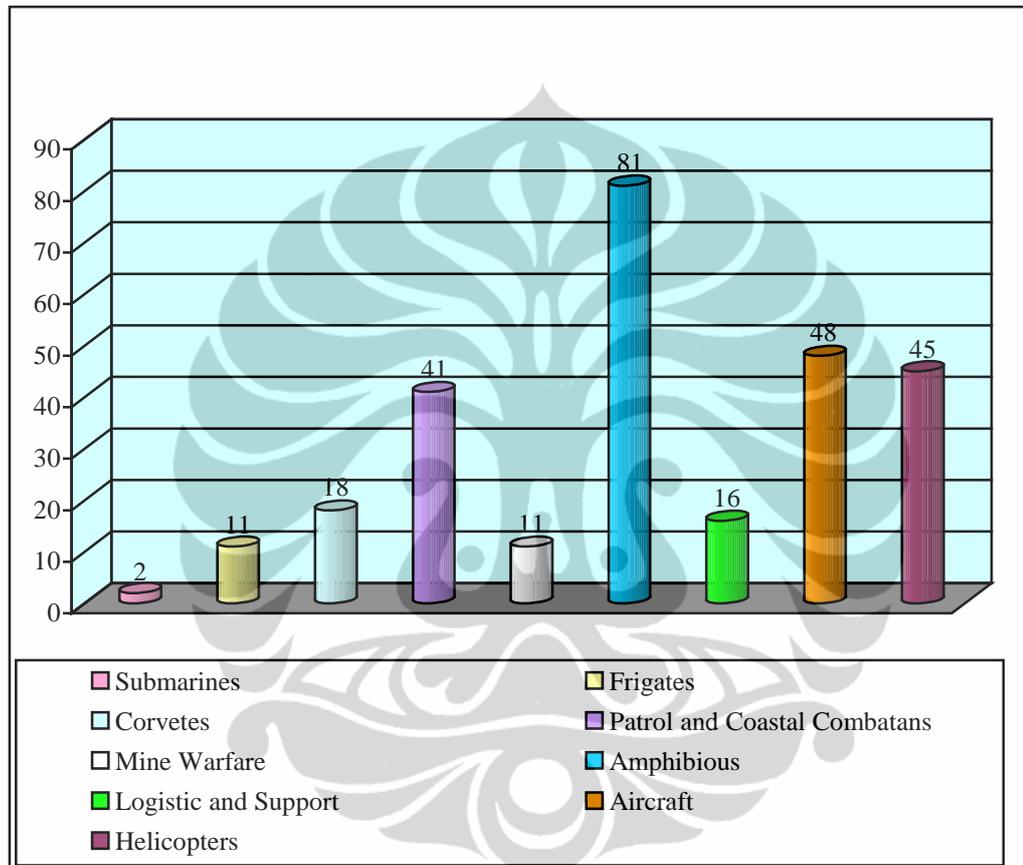


Grafik 3.7 Alutsista Angkatan Laut Indonesia Tahun 2007

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2007*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

Pada tahun 2008, sebagian besar jumlah alutsista tidak mengalami peningkatan, yaitu *submarines* yang masih sejumlah 2 unit, lalu *amphibious* dengan jumlah tetap sebanyak 81 unit. Selain itu, *logistic dan support* juga tidak mengalami perubahan sejumlah 16 unit. *Aircraft* dan *helicopters* juga tidak mengalami perubahan. *Aircraft* berjumlah 48 unit, dan *Helicopters* sebanyak 45 unit. Sedangkan alutsista yang mengalami penurunan, yaitu *Frigates* menjadi 11 unit yang terdiri dari 10 *frigade guided missile* dan 1 *frigate*. Lalu ada juga, *Mine Warfare* yang menjadi 11 unit terdiri dari 2 *mine countermeasure coastal*, 9 *mine*

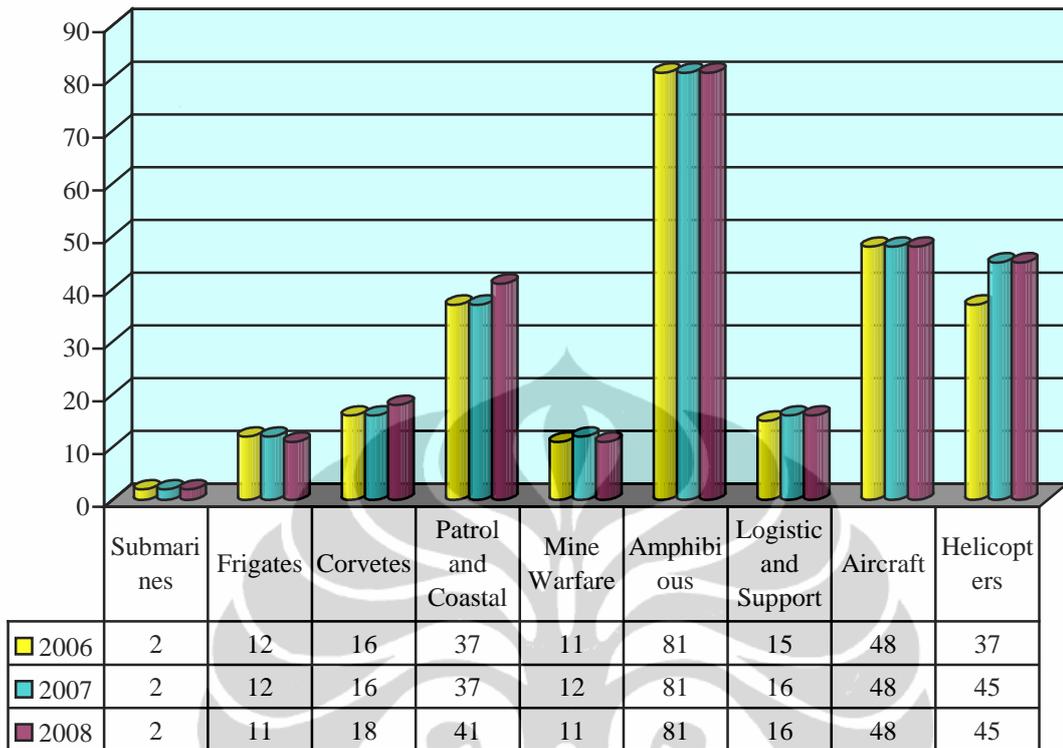
sweeper coastal. Akan tetapi, ada juga alutsista yang mengalami peningkatan, yaitu *Corvetes* menjadi sebanyak 18 unit, *Patrol and Coastal Combatans* menjadi sebanyak 41 unit yang terdiri dari 21 *patrol craft coastal*, 4 *fast patrol craft with surface to surface missile*, 4 *patrol craft torpedo*, 8 *patrol craft offshore* dan 4 *patrol craft*. Seperti dilihat pada Grafik 3.8.



Grafik 3.8 Alutsista Angkatan Laut Indonesia Tahun 2008

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2008*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

Pada umumnya, alutsista angkatan laut Indonesia selama periode 2006 hingga 2008 tidak selalu mengalami peningkatan, bahkan ada yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini seperti disimpulkan pada Grafik 3.9.



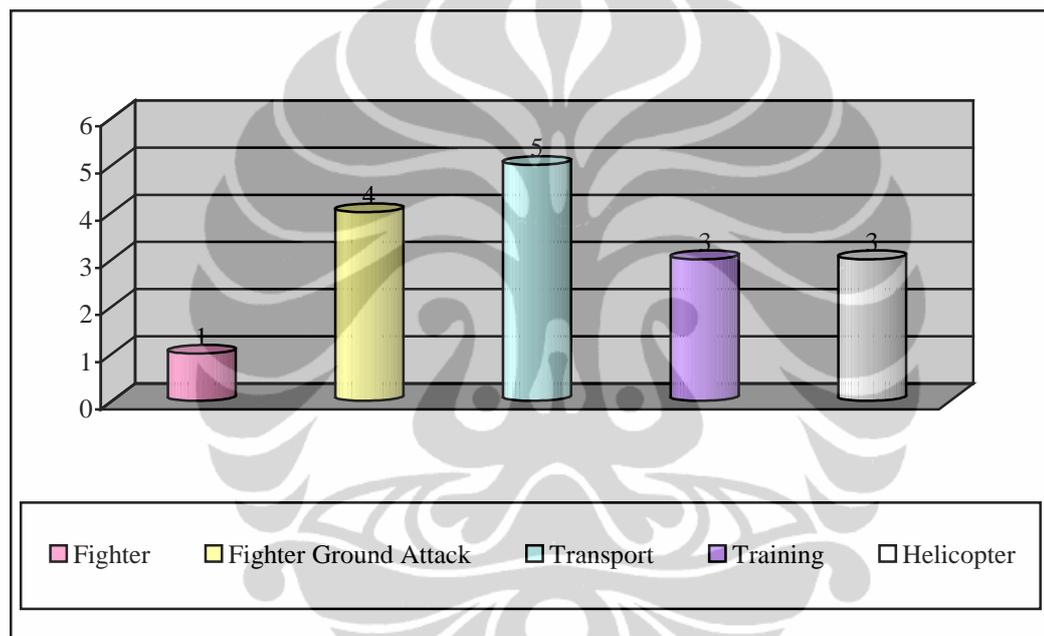
Grafik 3.9 Perkembangan Alutsista Angkatan Laut Indonesia Tahun 2006-2008

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2006 - 2008*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

Alat utama sistem persenjataan udara Indonesia dibagi menjadi lima kelompok yaitu *fighter*, *fighter ground attack*, *transport*, *training* dan *helicopter*. Pada tahun 2006, jumlah kelompok pertama yaitu *fighter* adalah sebanyak 1 skuadron (8F-5E Tiger II dan 4 F-5F Tiger II). Kelompok kedua adalah *fighter ground attack* yang berjumlah 4 skuadron terdiri dari 1 skuadron dengan 2 Su-30 MKI Flanker dan 2 Su27SK Flanker, 1 skuadron dengan 7F-16 A Fighting Skyhawk, 1 TA-4H Skyhawk dan 2 TA-4J Skyhawk, dan 2 skuadron dengan 7 Hawk MK109, 28 Hawk MK209.

Kelompok ketiga adalah *transport* sebanyak 5 skuadron terdiri dari 1 B-707, 8 C-130B Hercules, 10 NC-212 (CASA 212) Aviocar, 10 CN-235-110, 5 Cessna 401, 2 Cessna 402, 6 F-27-400m Trooship, 1 F-28-1000, 2 F-28-3000, 3

L-100-30, 1 SC.7 3M Skyvan, dan 4 Cessna 207 Stationair. Kelompok keempat adalah *training* sebanyak 3 skuadron terdiri dari 2 Cessna 172, 39 AS-202 Bravo, 7 Hawk MK53, 7 KT-1B, 19 SF-260/SF-260W Warrior, 20 T-34C Turbo Mentor, dan 6 T-41D Mescalero. Kelompok yang terakhir adalah *helicopter* sebanyak 3 skuadron terdiri dari 10 S-8T, 5 NAS-322L (AS-332L) Super Puma (VIP/CSAR), 11 NAS-330 (SA-300) Puma (1 NAS-330SM VIP), dan 12 EC-120B Colibri. Seperti pada Grafik 3.10.

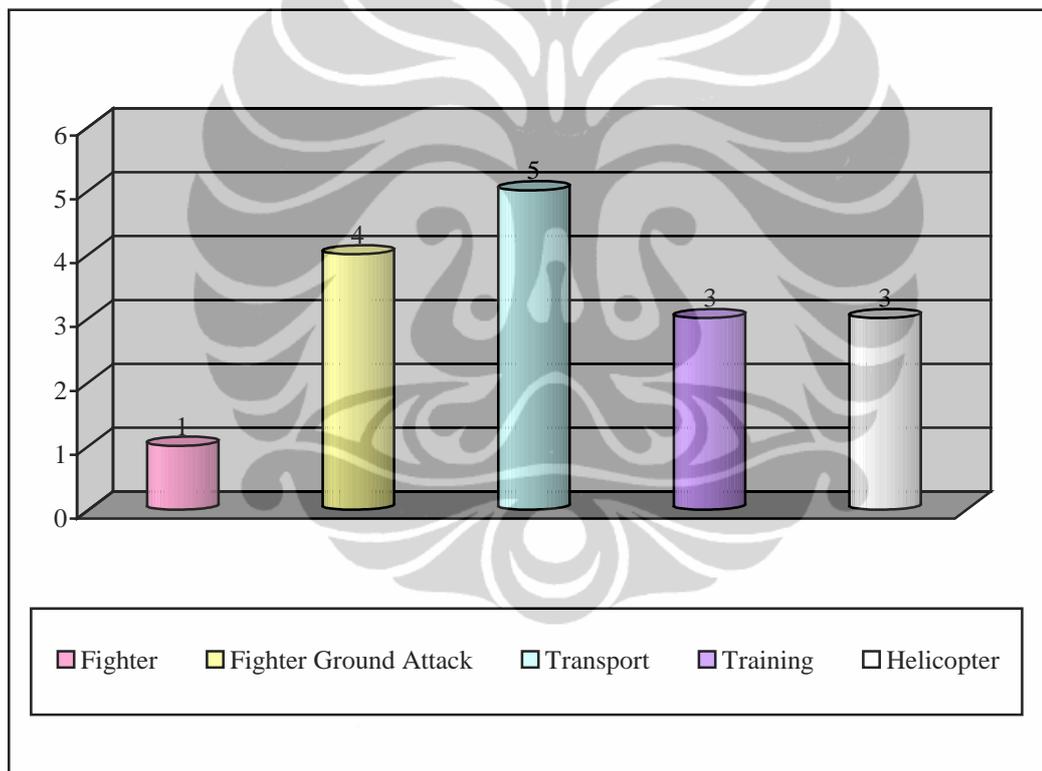


Grafik 3.10 Alutsista Angkatan Udara Indonesia Tahun 2006

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2006*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

Pada tahun 2007, jumlah kelompok pertama yaitu *fighter* adalah sebanyak 1 skuadron (8F-5E Tiger II dan 4 F-5F Tiger II). Kelompok kedua adalah *fighter ground attack* yang berjumlah 4 skuadron terdiri dari 1 skuadron dengan 2 Su-30 MKI Flanker dan 2 Su27SK Flanker, 1 skuadron dengan 7F-16 A Fighting Skyhawk, 1 TA-4H Skyhawk dan 2 TA-4J Skyhawk, dan 2 skuadron dengan 7 Hawk MK109, 28 Hawk MK209.

Kelompok ketiga adalah *transport* sebanyak 5 skuadron terdiri dari 1 B-707, 8 C-130B Hercules, 10 NC-212 (CASA 212) Aviocar, 10 CN-235-110, 5 Cessna 401, 2 Cessna 402, 6 F-27-400m Trooship, 1 F-28-1000, 2 F-28-3000, 3 L-100-30, 1 SC.7 3M Skyvan, dan 4 Cessna 207 Stationair. Kelompok keempat adalah *training* sebanyak 3 skuadron terdiri dari 2 Cessna 172, 39 AS-202 Bravo, 7 Hawk MK53, 7 KT-1B, 19 SF-260/SF-260W Warrior, 20 T-34C Turbo Mentor, dan 6 T-41D Mescalero. Kelompok yang terakhir adalah *helicopter* sebanyak 3 skuadron terdiri dari 10 S-8T, 5 NAS-322L (AS-332L) Super Puma (VIP/CSAR), 11 NAS-330 (SA-300) Puma (1 NAS-330SM VIP), dan 12 EC-120B Colibri. Seperti terlihat pada Grafik 3.11.



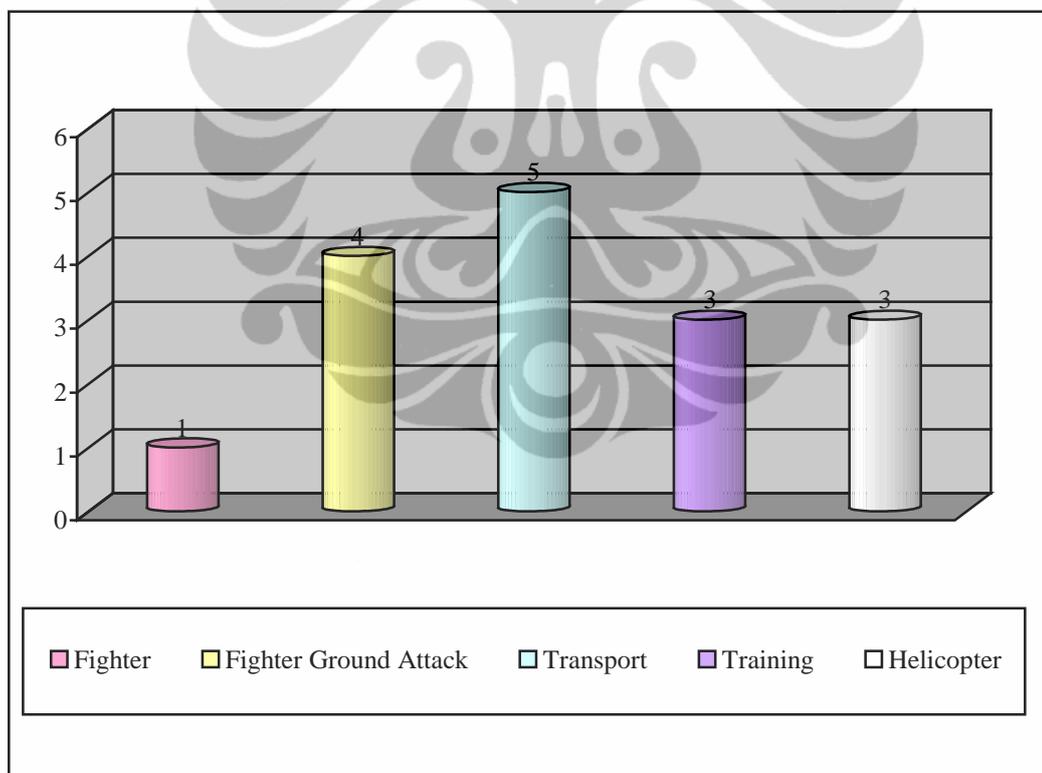
Grafik 3.11 Alutsista Angkatan Udara Indonesia Tahun 2007

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2007*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

Pada tahun 2008, jumlah kelompok pertama yaitu *fighter* adalah sebanyak 1 skuadron (8F-5E Tiger II dan 4 F-5F Tiger II). Kelompok kedua adalah *fighter ground attack* yang berjumlah 4 skuadron terdiri dari 1 skuadron dengan 2 Su-30

MKI Flanker dan 2 Su27SK Flanker, 1 skuadron dengan 7F-16 A Fighting Skyhawk, 1 TA-4H Skyhawk dan 2 TA-4J Skyhawk, dan 2 skuadron dengan 7 Hawk MK109, 28 Hawk MK209.

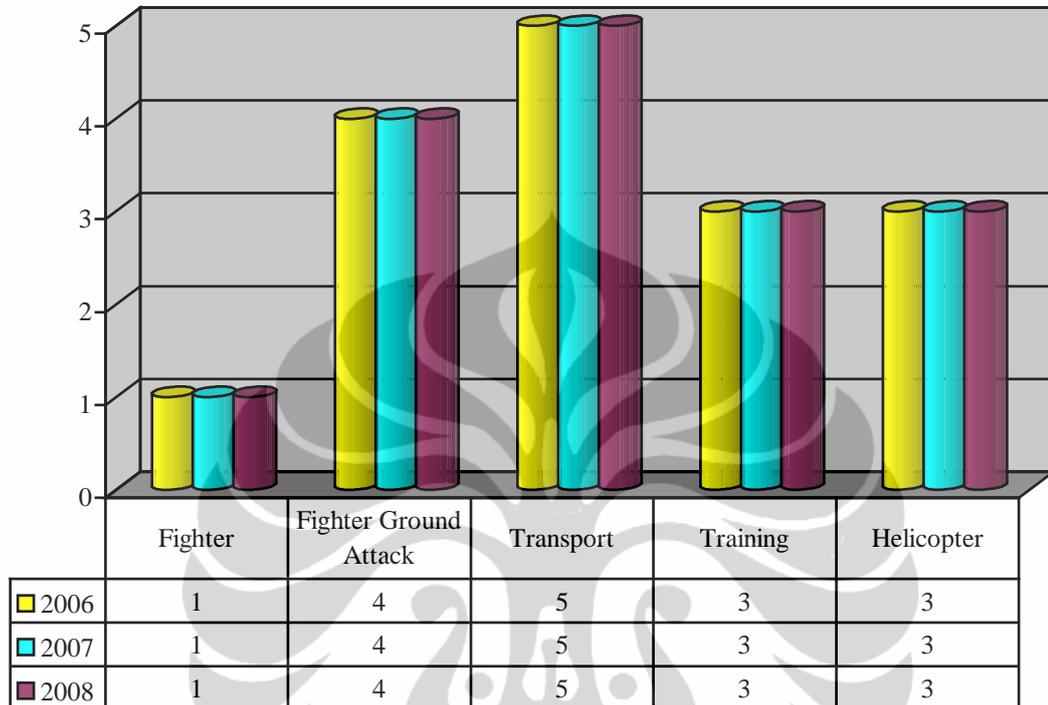
Kelompok ketiga adalah *transport* sebanyak 5 skuadron terdiri dari 1 B-707, 8 C-130B Hercules, 10 NC-212 (CASA 212) Aviocar, 10 CN-235-110, 5 Cessna 401, 2 Cessna 402, 6 F-27-400m Trooship, 1 F-28-1000, 2 F-28-3000, 3 L-100-30, 1 SC.7 3M Skyvan, dan 4 Cessna 207 Stationair. Kelompok keempat adalah *training* sebanyak 3 skuadron terdiri dari 2 Cessna 172, 39 AS-202 Bravo, 7 Hawk MK53, 7 KT-1B, 19 SF-260/SF-260W Warrior, 20 T-34C Turbo Mentor, dan 6 T-41D Mescalero. Kelompok yang terakhir adalah *helicopter* sebanyak 3 skuadron terdiri dari 10 S-8T, 5 NAS-322L (AS-332L) Super Puma (VIP/CSAR), 11 NAS-330 (SA-300) Puma (1 NAS-330SM VIP), dan 12 EC-120B Colibri. Seperti terlihat pada Grafik 3.12.



Grafik 3.12 Alutsista Angkatan Udara Indonesia Tahun 2008

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2008*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

Secara keseluruhan, alat utama sistem persenjataan Indonesia untuk matra udara tidak memiliki perubahan sama sekali. Kelima kelompok alutsista tersebut selama kurun waktu 2006 hingga 2008 mengalami stagnansi. Lihat Grafik 3.13.



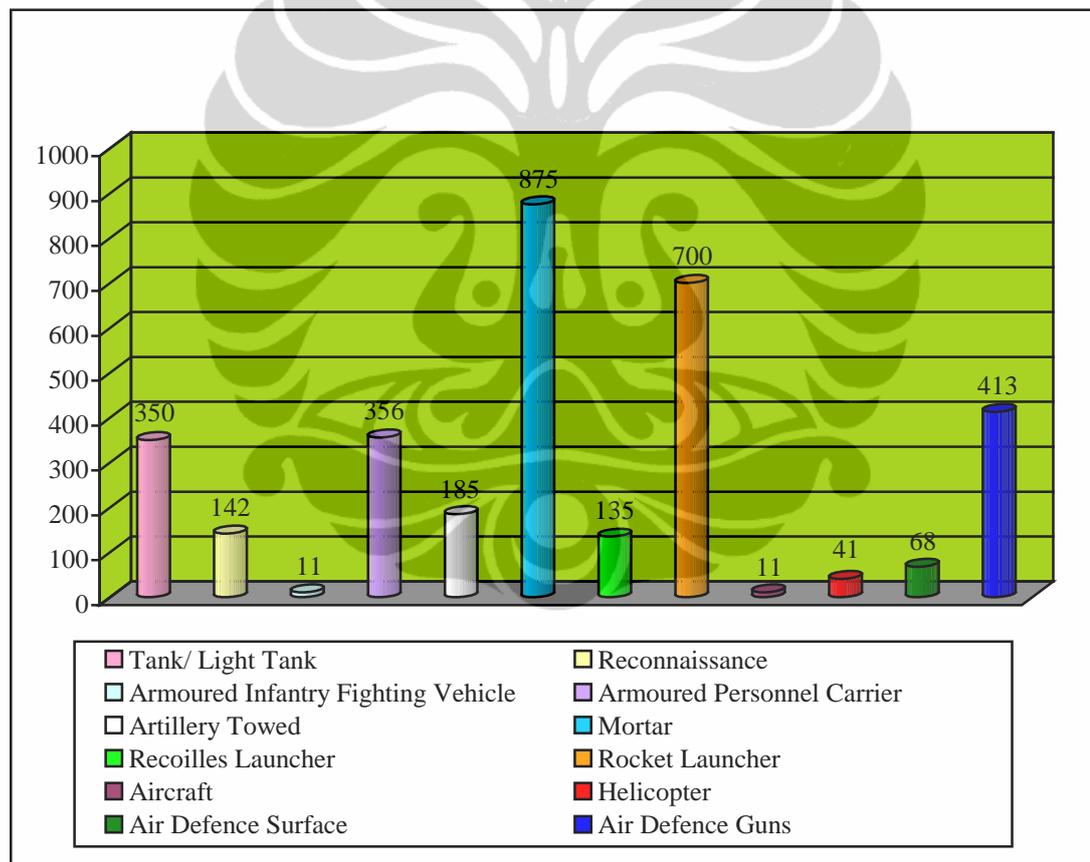
Grafik 3.13 Perkembangan Alutsista Angkatan Udara Indonesia Tahun 2006 - 2008

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2006-2008*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

Alat utama sistem persenjataan pada matra darat dibagi kedalam dua belas kelompok, yaitu pertama *Tank/ Light Tank*, *Armoured Infantry Fighting Vehicle*, *Armoured personnel carrier*, *Artillery towed*, *Mortar*, *Recoilless launcher*, *Rocket launcher*, *Helicopter*, *Air defence surface to air missile*, dan *Air defence Guns*.

Pada tahun 2006, alutsista pada matra darat dengan kelompok *Tank/ Light Tank* sebanyak 350 unit yang terdiri dari 275 AMX-13, 15 PT-76, 60 Scorpion 90 Reconnaissance 142 (55 Ferret, 69 saladdin, 18 VBL, *Armoured Infantry Fighting Vehicle* sebanyak 11 unit BMP-2, lalu *Armoured personnel carrier* 356 unit terdiri dari 75 AMX-VCI, 40 FV4333 Stromer, 80 BTR-40, 34 BTR-50PK, 22 *Commando Ranger*, FV603 Saracen 45 dan 60 LAV. *Artillery towed* berjumlah

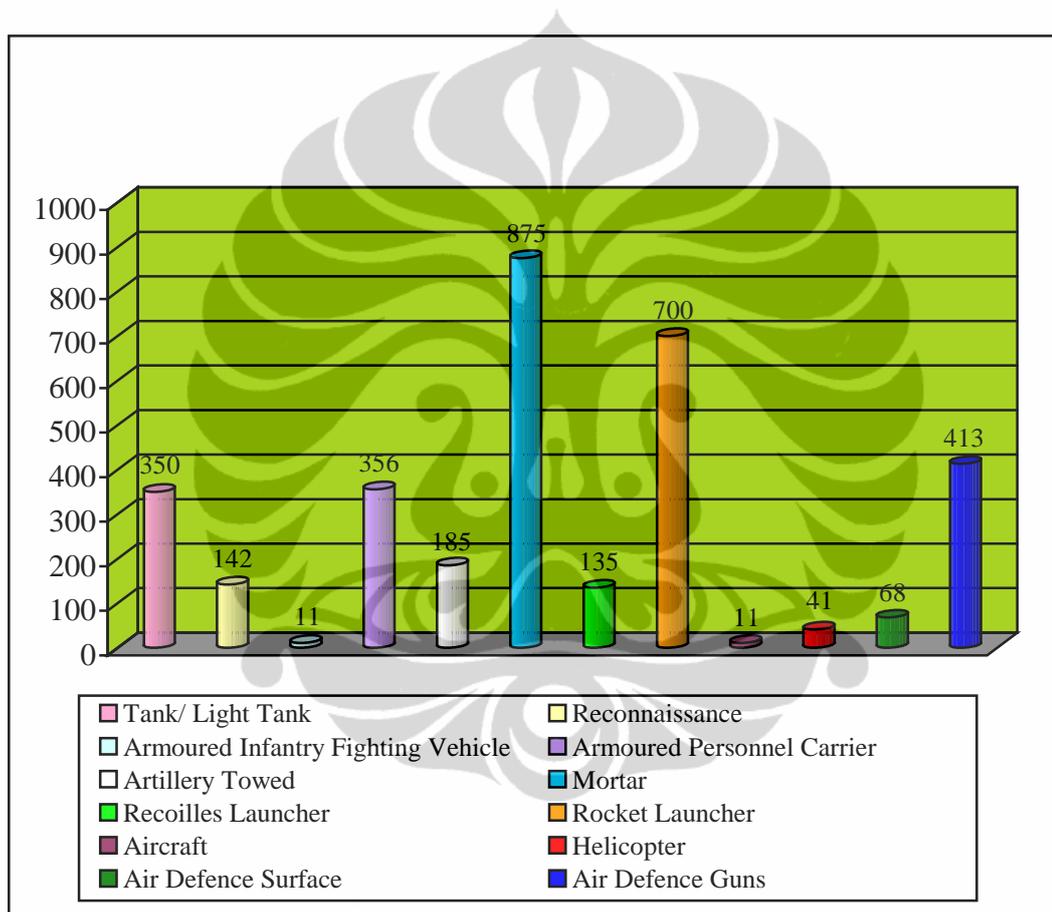
185 unit terdiri dari 50 unit M-48 M 1948, 120 unit M-101, 10 unit M-56 dan 5 unit FH-2000. Lalu *Mortar* sebanyak 875 unit terdiri atas 800 unit 81mm, dan 75 brandt. *Recoilless launcher* sebanyak 135 unit yaitu 45 unit M-40A1 dan 90 unit M-67. *Rocket launcher* 700 89mm, *Aircraft* 11 unit berupa 3 DHC-5 Buffalo, 6 NV-212 dan 2 *rockwell turbo commander*. *Helicopter* sebanyak 41 unit berupa 2 Mi-35 *Hind attack*, 37 unit *utility* dan 12 unit Hughes 300C. Lalu, *Air defence surface to air missile* sebanyak 68 unit berupa 51 Rapier dan 17 RBS-70. Terakhir, *Air defence Guns* sebanyak 413 unit berupa 121 unit Rh 202, 36 unit L/70, dan 256 S-60. Seperti pada Grafik 3.13.



Grafik 3.14 Alutsista Angkatan Darat Indonesia Tahun 2006

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2006*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

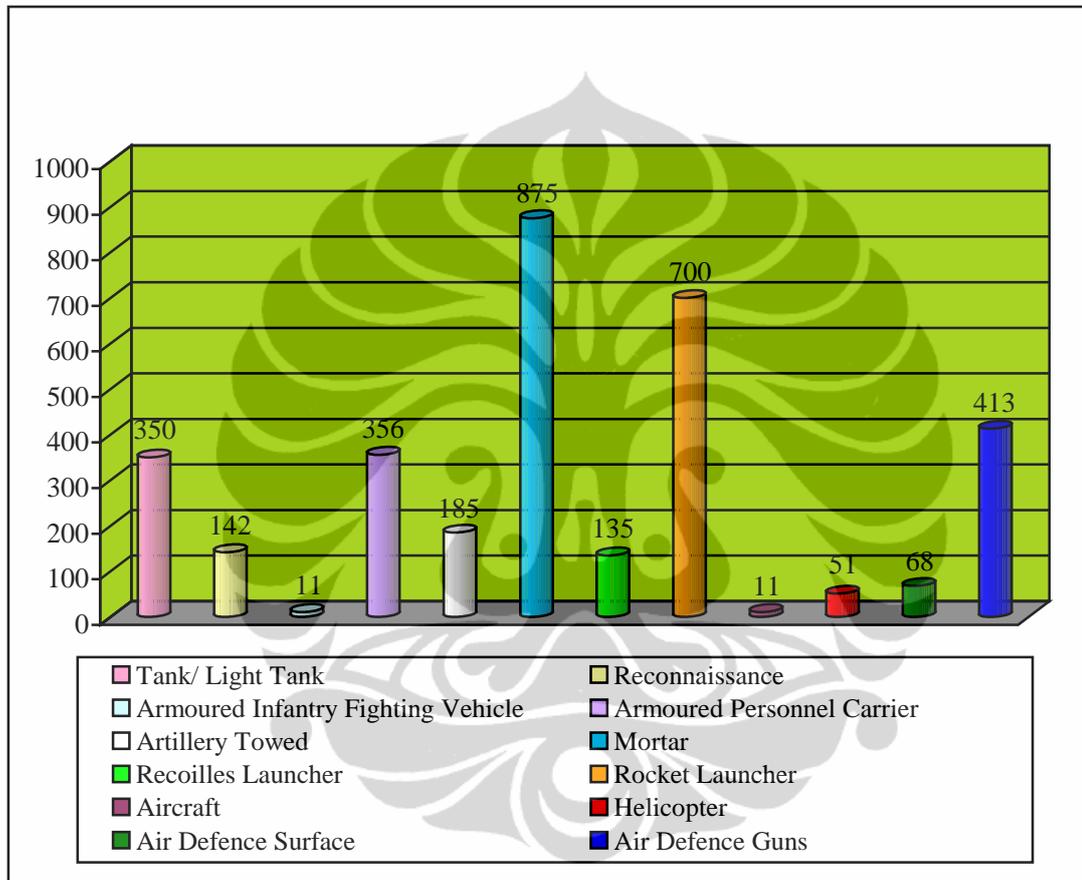
Beranjak pada tahun 2007, jumlah alutsista angkatan darat Indonesia tidak mengalami perubahan. Semua alutsista, baik itu *tank*, *armoured infantry fighting vehicle*, *artillery towed*, *rocoilles launcher*, *aircraft*, *air defence surface*, *reconnaissance*, *armoured personal carrier*, *mortar*, *rocket launcehr*, *helicopter*, dan *air defence guns* memiliki jumlah yang sama pada tahun sebelumnya. Seperti yang terlihat pada Grafik 3.14.



Grafik 3.15 Alutsista Angkatan Darat Indonesia Tahun 2007

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2007*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

Lalu, pada tahun 2008 alutsista angkatan darat Indonesia hanya mengalami peningkatan pada *helicopter* menjadi 51 unit berupa 2 unit Mi-35P Hind, 10 unit Mi-17 Hip, 37 unit *utility*, dan 12 Hughes 300C. Sedangkan yang lainnya tidak mengalami perubahan. Dapat dilihat pada Grafik 3.15.

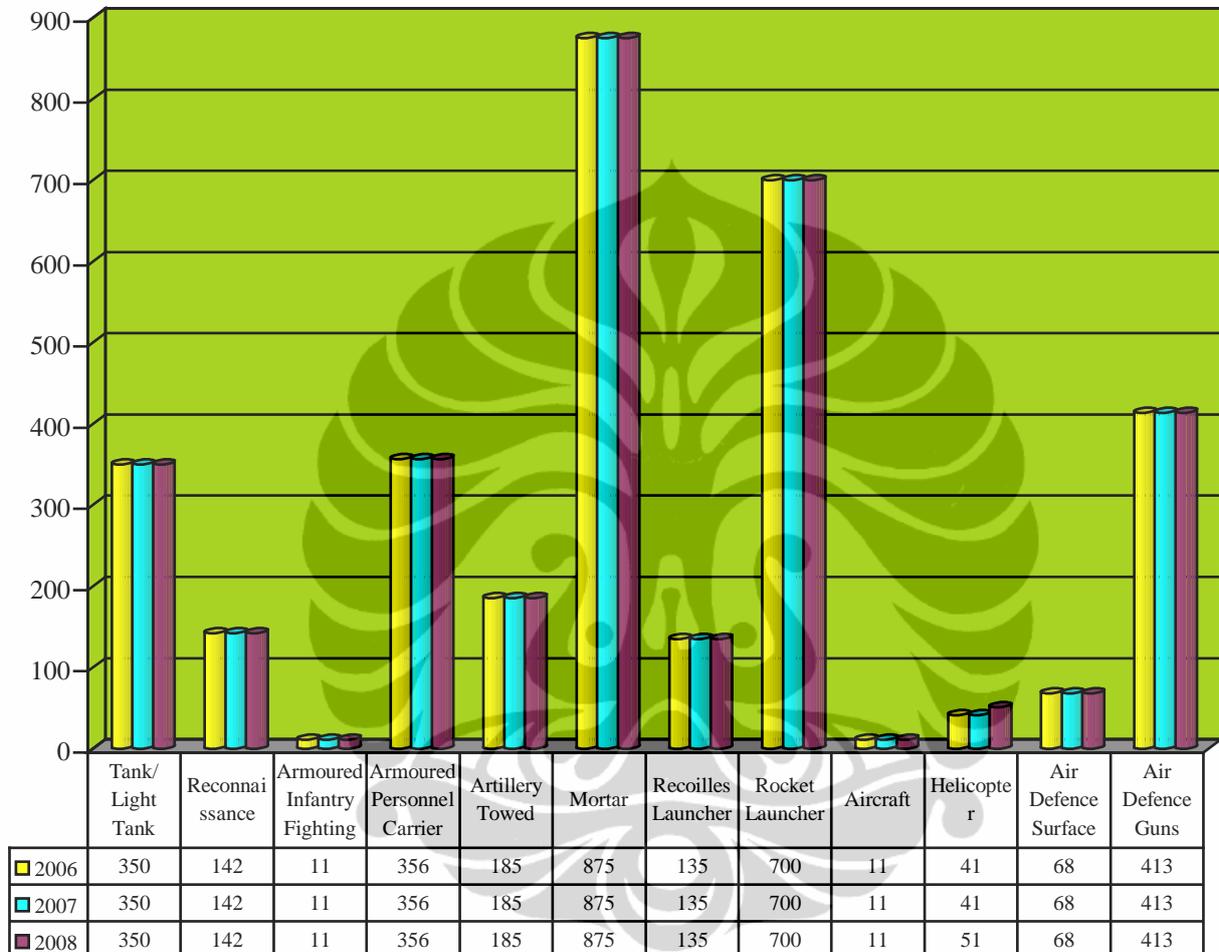


Grafik 3.16 Alutsista Angkatan Darat Indonesia Tahun 2008

(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2008*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

Secara keseluruhan, perkembangan alat utama sistem persenjataan Indonesia pada matra darat tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pasalnya, dari semua jenis alutsista, hanya *helicopter* yang mengalami peningkatan selama

periode 2006 hingga 2008, dari sejumlah 41 menjadi 51. Sedangkan alutsista lainnya tidak mengalami perubahan sedikit pun.



Grafik 3.17 Perkembangan Alutsista Angkatan Darat Indonesia Tahun 2006 - 2008

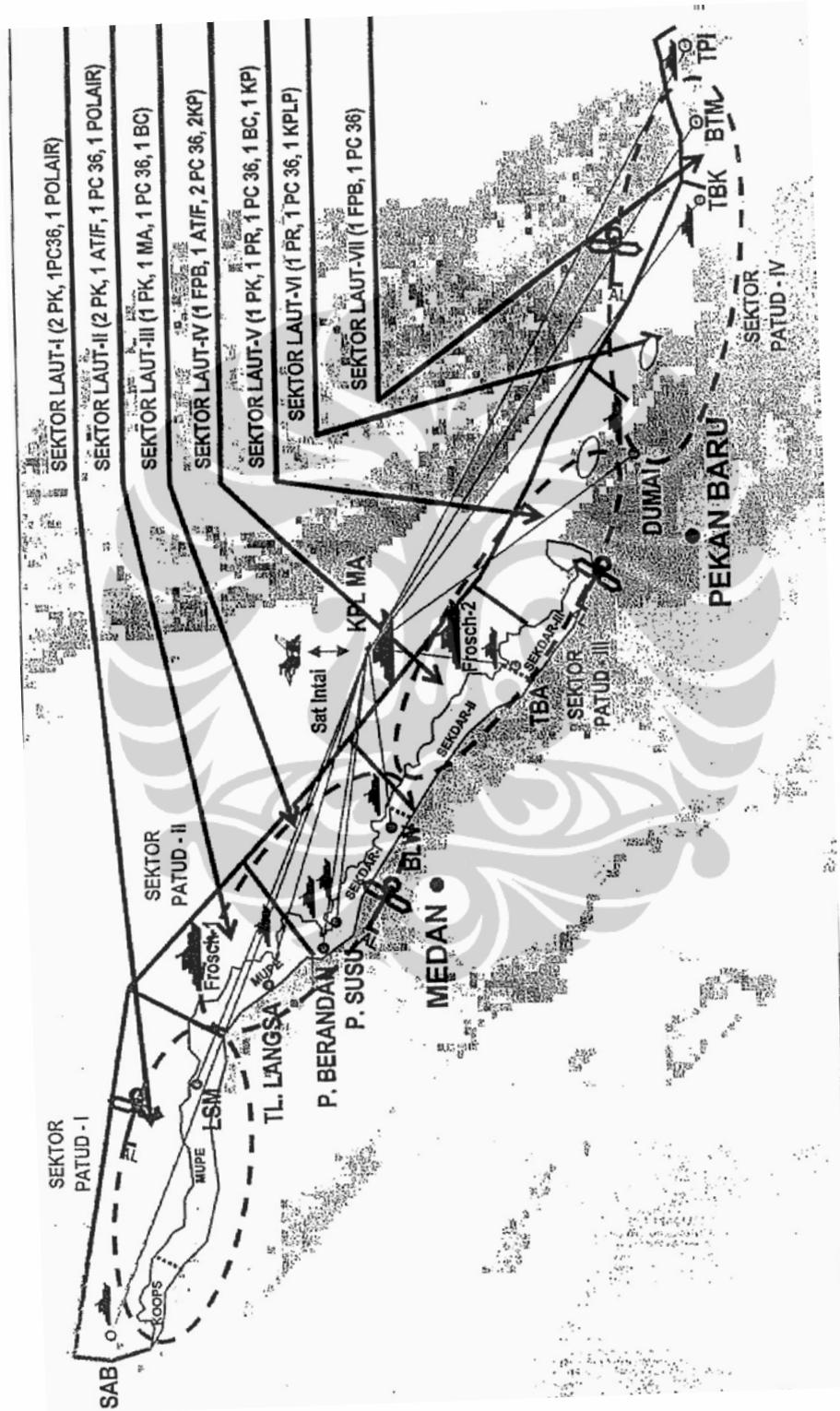
(Sumber: Diolah dari *Military Balance 2006- 2008*. London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies)

3.1.4 Kapabilitas Militer Indonesia di Selat Malaka Periode 2006-2008

Untuk mendalami strategi pertahanan yang dipilih Indonesia di Selat Malaka, maka perlu diketahui juga kapabilitas militer Indonesia di Selat Malaka selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Kapabilitas militer tersebut dapat diuraikan dalam setiap gelar operasi yang dilakukan Indonesia, terutama dengan *littoral state*, dan juga gelar pangkalan. Umumnya kapabilitas militer Indonesia di Selat Malaka tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pasalnya, gelar operasi yang dilakukan Indonesia, baik itu oleh TNI AL, TNI AL dengan Angkatan Laut Singapura dan Malaysia dilakukan secara berkesinambungan, setiap tahun secara berturut-turut. Oleh karena itu, kapabilitas militer Indonesia tidak mengalami perubahan berarti.

Gelar Operasi Indonesia di Selat Malaka, dibagi menjadi tujuh Sektor Laut, empat Sektor Darat, dua Pos Darat dan empat Sektor Patroli Udara.¹⁸⁰ Sektor Laut yang dibagi menjadi tujuh sektor memiliki kapabilitas militer yang berbeda. Sektor Laut I memiliki 2 Kapal Perusak Kawal (PK), 1 Kapal Patroli Cepat (PC36) dan 1 Polair. Sektor Laut II memiliki 2 Kapal Perusak Kawal, 1 Kapal Angkut Tank (AT), 1 Kapal Patroli Cepat (PC36) dan 1 Polair. Pada Sektor Laut III, Indonesia memiliki 1 Kapal Perusak Kawal, 1 Kapal Markas (MA), 1 Kapal Patroli Cepat jenis PC36 dan 1 Kapal Bea Cukai (BC). Sedangkan, pada Sektor IV, Indonesia menerjunkan 1 *Fast Patroli Board*, 1 Kapal Angkut Tank, 2 Kapal Patroli Cepat Jenis PC36, 2 KP. Lalu, pada Sektor Laut V, Indonesia memiliki 1 Kapal Perusak Kawal, 1 Kapal Penyapu Ranjau (PR), 1 Kapal Patroli Jenis PC36, 1 Kapal Bea Cukai (BC) dan 1 KP. Pada Sektor Laut VI, Indonesia menerjunkan 1 Kapal Penyapu Ranjau, 1 Kapal Patroli Cepat, 1 Kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). Terakhir, pada Sektor Laut VII, terdiri dari 1 *Fast Patrol Boat* (FPB) dan 1 Kapal Cepat jenis PC36.

¹⁸⁰ Berdasarkan data yang diperoleh dari Armada Kawasan Barat Republik Indonesia.



Gambar 3.1 Gelar Operasi Indonesia di Selat Malaka

(Sumber: Staf Umum Operasi Armada Kawasan Barat Republik Indonesia)

Selain gelar operasi yang dilakukan oleh TNI AL, Indonesia juga mengadakan Patroli terkoordinasi dengan Malaysia dan Singapura (Malsindo) yang diluncurkan pada Juli 2004, menetapkan setiap negara pantai mengerahkan tujuh kapal perang dan dua pesawat udara untuk mengamankan selat sepanjang 500 mil tersebut.¹⁸¹ Menurut Kasal Laksamana Slamet Soebijanto, untuk mengamankan perairan Indonesia di Selat Malaka, Indonesia idealnya mengerahkan 36 kapal perang, tapi hanya 7 kapal patroli yang bisa digelar.¹⁸²

Secara lebih rinci, pada operasi *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP), pihak Indonesia memiliki kapabilitas militer yang terdiri dari 1132 personel.¹⁸³ Lalu juga ada enam Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang terdiri dari 1 Kapal Perusak Kawal, 1 *Fast Patrol Boat* (FPB), 1 Kapal Penyapu Ranjau (KPR) dan 2 Kapal Patroli Cepat (CP). Selain itu, ada juga 2 Pesawat Udara (Pesud) dengan jenis 1 CN-212 dan 1 NC-212 MPA. Selanjutnya, ada 2 Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), 6 Pangkalan TNI AL (Lanal), 8 Pos TNI AL (Posal), 2 Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal) dan 8 Satuan Radar.

Selain menggelar patroli bersama Singapura dan Malaysia, Indonesia juga melakukan patroli terkoordinasi secara bilateral dengan Singapura, dan juga Malaysia. Kegiatan patroli terkoordinasi antara Indonesia dan Singapura, Indonesia mengerahkan 335 personel TNI AL, tiga Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang terdiri dari 1 *Fast Patrol Boat* (FPB), 1 Kapal Patroli Cepat (PC), dan 1 Penyapu Ranjau. Selain itu juga ada tiga Kapal Angkatan Laut, dan 2 Pangkalan TNI AL.

Pada Patroli Terkoordinasi antara Indonesia dengan Malaysia (Patkor Malindo), Indonesia mengerahkan 306 personel, 2 Kapal Perang Republik Indonesia jenis Patroli Cepat (PC), 1 Pesawat Udara jenis CN-212, 1 Pangkalan Utama TNI AL, 1 Pangkalan TNI AL, dan 1 Pangkalan Udara TNI AL. Pada Patroli Terkoordinasi antara India dan Indonesia (Indindo), Indonesia mengerahkan 152 personel, 1 Kapal Perang Republik Indonesia jenis Kapal

¹⁸¹ Lihat *Pengamanan Selat Malaka dari Aksi Teror*. 13 Oktober 2005. <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=124147>

¹⁸² Lihat *Selat Malaka Kini Lebih Aman*. 25 Mei 2007. <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=7788>

¹⁸³ Diolah dari Staf Umum Operasi Markas Besar TNI AL

Perusak Kawal (PK), 1 Pesawat Udara (Pesud) jenis NC-212 MPA, 1 pangkalan TNI AL dan 1 pangkalan udara TNI AL.

Pada Patroli Optima, Indonesia menerjunkan 160 personel, 2 Kapal Perang Republik Indonesia berupa 1 *Fast Patrol Boat* dan 1 Kapal Patroli Cepat, dan 2 Pangkalan TNI AL. Sedangkan, untuk Patroli Terkoordinasi antara Indonesia dengan Thailand, Indonesia menerjunkan 166 personel, 1 Kapal Perang Indonesia jenis Patroli Cepat/ Parchim, 1 Pesawat Udara jenis CN-212, 1 Pangkalan Utama TNI AL dan 2 Pangkalan TNI AL.

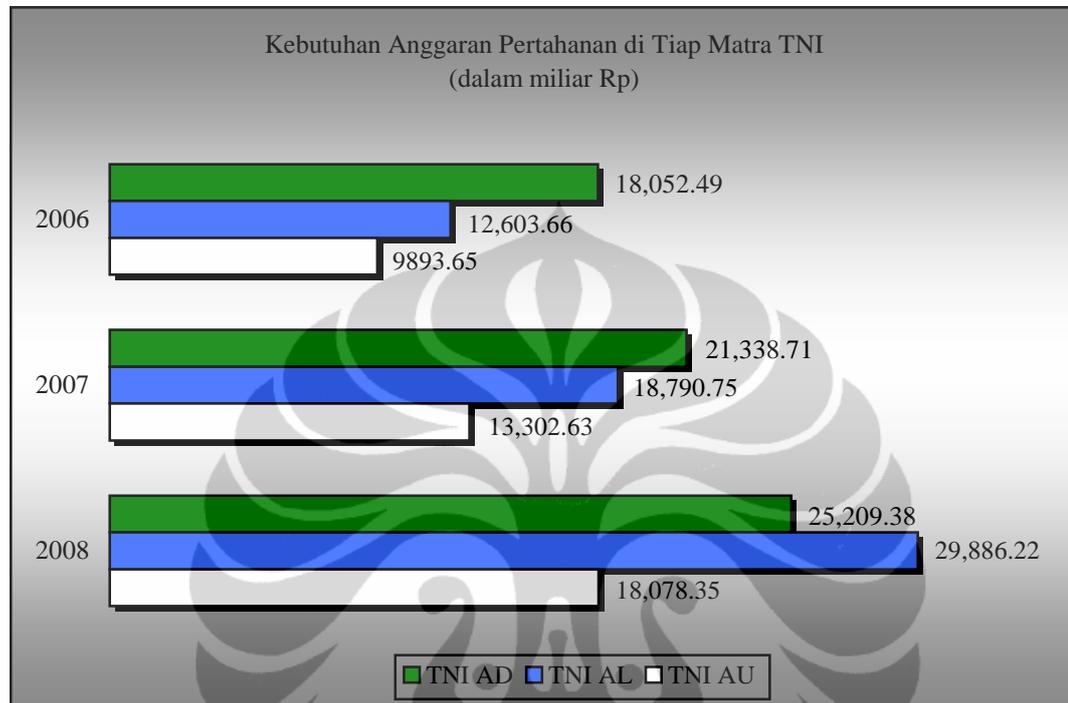
Selain itu, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand juga meluncurkan kerjasama pengamanan melalui udara, *Eyes in the Sky* (EiS) guna mendukung patroli terkoordinasi di sepanjang Selat Malaka. Untuk memudahkan upaya menekan tindak kejahatan laut di Selat Malaka, masing-masing negara mendirikan *incident hotline station*, yakni Sabang, Dumai (Indonesia), Lumut (Malaysia), Pukhet (Thailand), dan Changi (Singapura).¹⁸⁴

Kapabilitas militer Indonesia di Selat Malaka, terutama yang dimiliki TNI AL tidak hanya dari segi *manpower* (personel) dan alat utama sistem persenjataan, tapi juga berupa anggaran pertahanan sebagai dukungan secara ekonomi. Secara umum, anggaran pertahanan Indonesia dibagi menjadi tiga matra, yaitu TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Secara umum, kebutuhan anggaran ketiga matra TNI, yaitu TNI AD, TNI AL, dan TNI AU mengalami peningkatan. Seperti dapat dilihat pada Grafik 3.15.

Peningkatan kebutuhan anggaran pertahanan terbesar dimiliki oleh TNI AL sebesar 54% setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2006 sebesar Rp 12.603,66 miliar yang mengalami peningkatan pada tahun 2007 menjadi Rp 18.790,75 miliar, dan pada tahun 2008 menjadi Rp 29.886,22 miliar. Lalu peningkatan anggaran terbesar kedua dimiliki oleh TNI AU. Pada tahun 2006 kebutuhan anggaran pertahanan TNI AU sebesar Rp 9893,65 yang meningkat pada tahun 2007 menjadi Rp 13.302,63 miliar, lalu semakin meningkat pada tahun 2008 menjadi Rp 18.078,35 miliar. Sedangkan, posisi peningkatan terbesar ketiga ditempati oleh TNI AD dengan rata-rata peningkatan kebutuhan anggaran

¹⁸⁴ Lihat *Pengamanan Selat Malaka dari Aksi Teror. Opcit.*

pertahanan sebesar 18% setiap tahunnya. Pada tahun 2006 sebesar Rp 18.052,49 miliar, lalu pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 21.338,71 miliar, dan pada tahun 2008 menjadi Rp 25.209,38 miliar. Lihat Grafik 3.15.



Grafik 3.18 Kebutuhan Anggaran Pertahanan di Tiap Matra TNI

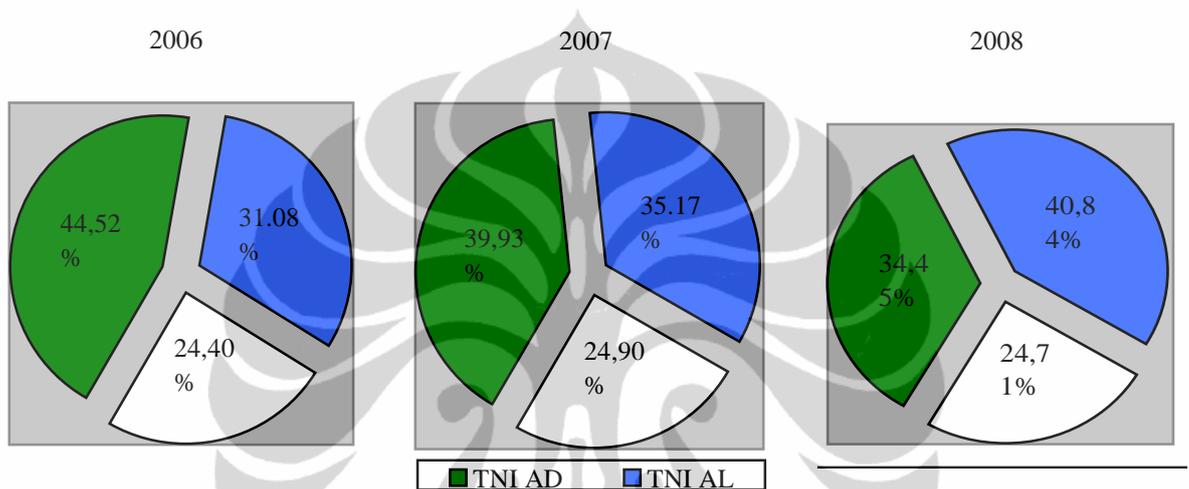
(Sumber: Diolah dari *Minimum Essential Force* Komponen Utama. 5 Februari 2010. Kementerian Pertahanan RI)

Dengan demikian, alokasi kebutuhan anggaran pertahanan setiap tahunnya semakin meningkat dengan TNI AL sebagai pemegang peningkatan alokasi kebutuhan anggaran pertahanan terbesar setiap tahunnya selama periode 2006-2008. Secara keseluruhan, anggaran pertahanan pada ketiga matra mengalami peningkatan, tapi peningkatan anggaran tersebut lebih banyak dialokasikan untuk TNI AL. Pada tahun 2006, persentase anggaran TNI AL sebesar 31,08% dari total anggaran, lalu meningkat pada tahun berikutnya menjadi 35,17%, dan semakin meningkat pada tahun 2008 sebesar 40,84%.

Lain halnya dengan TNI AU yang mengalami perubahan tidak menentu dimana pada tahun 2006 memiliki 24,40% dari total anggaran, dan meningkat

pada tahun 2007 menjadi sebesar 24,90%. Namun, alokasi anggaran pertahanan TNI AU pada tahun 2008 menurun menjadi 24,71%.

Di sisi lain, TNI AD mengalami kejangan dalam penurunan alokasi anggaran pertahanan. Pada tahun 2006, TNI AD memiliki alokasi sebesar 44,52%, tapi mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 39,93%. Alokasi anggaran pertahanan TNI AD pun semakin mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 34,45%. Lihat Grafik 3.16.



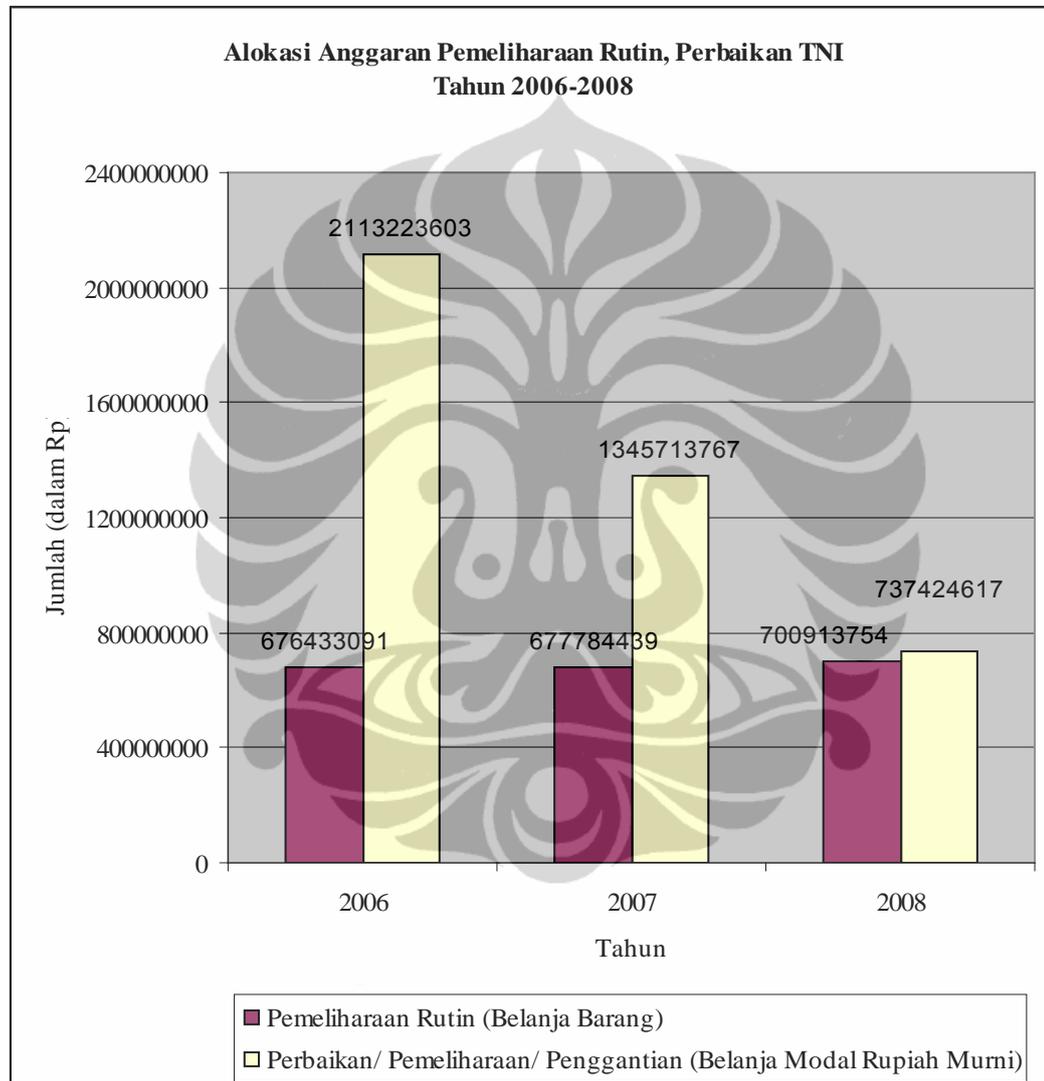
Grafik 3.19 Perubahan Alokasi Anggaran Pertahanan di Tiap Matra

(Sumber: Diolah dari *Minimum Essential Force* Komponen Utama. 5 Februari 2010. Kementerian Pertahanan RI)

Berdasarkan data tersebut, rata-rata kebutuhan anggaran pertahanan Indonesia mengalami peningkatan pada masing-masing matra, yaitu TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Akan tetapi, tidak semua matra mengalami peningkatan akan alokasi kebutuhan anggarannya. Dalam hal ini, alokasi anggaran TNI AL mengalami peningkatan yang signifikan. Lain halnya dengan alokasi anggaran TNI AU yang cenderung tidak stabil. Bahkan, alokasi kebutuhan anggaran pertahanan TNI AD cenderung berkurang setiap tahunnya pada periode 2006 hingga 2008.

Sejalan dengan kebutuhan anggaran pertahanan, Indonesia juga membutuhkan dana dalam pemeliharaan, perbaikan atau penggantian alat utama

sistem persenjataan. Pada laporan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Dephan Tahun 2009,¹⁸⁵ alokasi anggaran pemeliharaan, perbaikan, penggantian alat utama sistem persenjataan dibagi menjadi dua, yaitu alokasi pemeliharaan rutin alat utama sistem persenjataan (belanja barang), dan perbaikan, pemeliharaan dan penggantian alat utama sistem persenjataan.



**Grafik 3.20 Alokasi Anggaran Pemeliharaan/Perbaikan/Penggantian
Alutsista Periode 2006-2008**

(Sumber: Diolah dari *Minimum Essential Force Komponen Utama*. 5 Februari 2010. Kementerian Pertahanan RI)

¹⁸⁵ Lihat *Minimum Essential Force Komponen Utama*. 5 Februari 2010. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hal 100.

Pada tahun 2006, anggaran pemeliharaan rutin alutista Indonesia sebesar Rp 676.433.091, lalu meningkat pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp 677.784.439. Lalu terus meningkat pada tahun 2008 menjadi Rp 700.913.754. Akan tetapi, alokasi anggaran perbaikan/ pemeliharaan/ penggantian alutsista menurun setiap tahunnya selama periode 2006-2008. Pada tahun 2006, alokasi anggaran sebesar Rp 2.113.223.603, pada tahun 2007 menurun menjadi Rp 1.345.713.767, dan semakin menurun pada tahun 2008 menjadi Rp 737.424.617. Lihat Grafik 3.17.

3.2 Strategi Pertahanan Indonesia di Selat Malaka Periode 2006 – 2008

Pengendalian laut (*command of the sea*) yang dilakukan Indonesia di Selat Malaka periode 2006-2008 turut mencerminkan pilihan strategi yang dipakai Indonesia di Selat Malaka. Secara umum, perjuangan negara mendapatkan *power* tidak dapat dipisahkan dari perilaku dan tindakan negara ketika menghadapi ancaman yang datang. Oleh karena itu, strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka akan dianalisis berdasarkan *power* yang dimiliki Indonesia. *Power* dalam hal ini berupa kapabilitas militer dan juga termasuk didalamnya gelar operasi pengamanan di Selat Malaka. Dengan demikian, dapat dianalisis, Indonesia lebih cenderung menggunakan strategi pertahanan *balancing*, *bandwagoning*, atau *hedging* terhadap pengamanan di Selat Malaka periode 2006-2008.

Balance of power menekankan pada efektivitas kontrol terhadap kekuatan sebuah negara dengan melihat kekuatan negara lainnya. Dengan menggunakan teori *balance of power* maka setiap peningkatan kapabilitas kekuatan (*power*) pertahanan terutama militer akan direspon balik oleh negara lainnya karena merasa terancam dengan kondisi demikian. Oleh karenanya, negara cenderung melakukan strategi *balancing* yang merupakan strategi negara untuk meningkatkan kemampuannya (kapabilitas internal) untuk mengimbangi ancaman atau lawan. Dalam *balancing* tidak ada tindakan untuk melawan ancaman atau lawan.

Jika *balancing* dikaitkan dengan strategi pertahanan Indonesia terhadap *Proliferation Security Initiative* di Selat Malaka, maka seharusnya Indonesia melakukan peningkatan kapabilitas militernya. Namun, sebaliknya, Indonesia

tidak melakukan hal tersebut. Pasalnya, kapabilitas militer Indonesia, terutama di Selat Malaka tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2006 hingga 2008 dimana masa tersebut merupakan masa datangnya tawaran *Proliferation Security Initiative*.

Merujuk pada kemampuan kapabilitas militer yang dimiliki Indonesia, terutama dalam hal alat utama sistem persenjataan, Indonesia belum mempunyai alutsista yang unggul sebagai dasar untuk dijadikan *balancing* dengan kekuatan dominasi lainnya. Meski alokasi kebutuhan anggaran untuk TNI AL mengalami peningkatan, tapi secara keseluruhan hal tersebut belum dapat dikatakan tindakan *balancing*. Pasalnya, Indonesia tidak melakukan *balancing* terhadap kemampuan *manpower* dan anggaran pertahanannya. Hal ini dapat dilihat selama periode 2006-2008, *manpower* Indonesia tidak mengalami peningkatan. Hal serupa juga dialami dengan *defence budget* Indonesia yang tidak mengalami peningkatan, bahkan mengalami penurunan.

Disisi lain, ketidakmampuan Indonesia untuk melakukan *balancing*, membuat Indonesia harus menjalin kerjasama dengan *littoral state* lainnya, yaitu Singapura dan Malaysia. Terlepas dari adanya kewajiban dari UNCLOS 1982 bagi negara pantai untuk mengamankan Selat Malaka, dapat dilihat bahwa Indonesia melakukan kerjasama pertahanan karena salah satu alasan lemahnya kemampuan militer Indonesia di Selat Malaka. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 mengenai usaha pengamanan Indonesia secara mandiri di Selat Malaka.

**Tabel 3.1. Pengamanan Selat Malaka oleh Indonesia
Periode 2006-2008**

No.	Jenis Operasi	Pelaksana	Periode Pelaksanaan
1	Operasi MSSP (<i>Malacca Straits Sea Patrol</i>)	TNI AL, TLDM dan RSN	Sepanjang Tahun
2	Operasi Keamanan Laut	TNI AL bekerjasama dengan Bakorkamla	Sepanjang Tahun
3	Operasi secara berkala. (Operasi Siaga Purla)	TNI AL	Sepanjang Tahun
4	Operasi Trisila	TNI AL	90 Hari/Periode

			(1x per Tahun)
5	Operasi Satgas Mupe	Marinir TNI AL	Sepanjang Tahun
6	Operasi Satgasla Koopslihkam	TNI AL	180 Hari/Periode (2x per Tahun)
7	Operasi Preventif (Binpotmar, Bintermatla, Operasi Bakti Parsial, Intelijen Maritim, dan Pengembangan Pola Deteksi Dini Unsur Udara)	TNI AL	Sepanjang Tahun
8	Gelar Pangkalan TNI AL (Lanal)	TNI AL	Sepanjang Tahun
9	Gelar Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal)	TNI AL	Sepanjang Tahun
10	Gelar Satuan Operasi TNI AL	TNI AL	Sepanjang Tahun

Sesungguhnya, hanya terdapat tujuh gelar operasi yang dilakukan oleh TNI AL (termasuk kerjasama dengan instansi lain di Indonesia) dalam pengamanan di Selat Malaka. Jumlah pelaksanaan operasi ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan jumlah kerjasama pertahanan dengan *littoral state*. Lihat Tabel 3.2. Oleh karena itu, dapat ditegaskan sekali lagi, bahwa strategi yang dilakukan Indonesia tidak sejalan dengan prinsip *balancing*.

Tabel 3.2. Kerjasama Pertahanan Indonesia di Selat Malaka dengan *Littoral State* Periode 2006-2008

No.	Jenis Operasi/ Kerjasama pertahanan	Pelaksana	Periode Pelaksanaan
1	<i>Malacca Straits Identification System (MSIS)</i>	<i>littoral State</i>	Sepanjang Tahun
2	<i>Joint Maritime Security Operation (JMSO)</i>	<i>littoral State</i>	Sepanjang Tahun
3	<i>Joint Maritime Air Patrol Operation (JMAP)</i>	<i>littoral State</i>	Sepanjang Tahun
4	<i>Integrated Maritime Surveillance System Facility (IMSS)</i>	<i>littoral State</i>	Sepanjang Tahun
5	<i>Margin of Allowable Hot Pursuit</i>	<i>littoral State</i>	Sepanjang Tahun
6	<i>Intelligence and Information Exchange</i>	<i>littoral State</i>	Sepanjang Tahun
7	<i>Public Information Campaign</i>	<i>littoral State</i>	Sepanjang Tahun
8	Patkor Malaysia-Indonesia (Malindo)	Malaysia – Indonesia	4x per Tahun

9	Patkor Optima Malindo	Malaysia – Indonesia	1x per Tahun
10	Patkor Indonesia-Singapura (Indosin)	Singapura – Indonesia	4x per Tahun
11	Patkor Indonesin	Indonesia – India	1x per Tahun
12	Patkor Malsindo	<i>littoral State</i>	Sepanjang Tahun

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber¹⁸⁶)

Selain dengan *littoral state*, Indonesia juga mendapatkan tawaran kerjasama pertahanan di Selat Malaka dari para *user state*, baik itu dalam tingkat regional, maupun internasional selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Para *user state* yang kerap kali menawarkan kerjasama pertahanan, baik itu berupa penggelaran militer atau hanya dalam hal teknis, yaitu, Thailand, India, Amerika Serikat, Jepang, Cina dan Korea Selatan. Lihat Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Tawaran *User State* terhadap Pengamanan Selat Malaka kepada Indonesia Periode 2006-2008

No.	Waktu	Negara	Nama	Keterangan	Status
1	2002	Amerika Serikat	<i>Container Security Initiative (CSI)</i>	Dilakukan dengan menempatkan Bea Cukai AS di pelabuhan-pelabuhan asing.	Tidak Ikut Serta
2	2004	Amerika Serikat	<i>Regional Maritime Security Initiative (RMSI)</i> yang diusung AS dalam rangka patroli untuk menghapus teroris	Admiral Tohams Boulton Fargo selaku Komandan US PACOM di Singapura menyatakan akan membersihkan Selat Malaka dari teroris.	Tidak Ikut Serta

¹⁸⁶ Lihat *Malacca Strait Security Initiative Concept* oleh Staff Umum Operasi MABES AL., Implementasi Kebijakan Nasional Pengamanan Selat Malaka oleh Staf Umum Operasi Mabes TNI AL, Cilangkap tahun 2010, dan juga Pengelolaan Keamanan Selat Malaka Secara Terpadu Laksmana Pertama (TNI) Edhi Nudwantoro, Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat yang disampaikan dalam Pertemuan Kelompok Ahli tentang 'Kebijakan Terpadu Pengelolaan Keamanan Selat Malaka' di Medan, 19-20 Juli 2005 oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri.

3	2004	Amerika Serikat	<i>Global Threat Reduction Initiative (GTRI)</i> dengan misi untuk mencegah jatuhnya material radioaktif dan nuklir pada teroris dan aktor-aktor lainnya yang dicurigai melawan AS.	Tindakan tanggap dari Departemen Energi AS atas Pidato Presiden George Bush pada 11 Pebruari 2004 yang menyatakan bahwa AS tengah menghadapi ancaman serius dari serangan teroris di seluruh belahan bumi dengan kemungkinan menggunakan material radioaktif dan nuklir.	Tidak Ikut Serta
4	2005	Thailand	Patroli Terkoordinasi	Keinginan Thailand untuk ikut patkor bersama <i>littoral state</i> , yang dibahas dalam Shangrilla Dialogue di Kuala Lumpur 2 Agustus 2005, yang dihadiri panglima angkatan bersenjata tiga negara pantai dan Thailand.	Belum Terlaksana
5	2005	Cina	<i>Joint Declaration antara Republik Indonesia and RRC on Strategic Partnership</i>	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani <i>Joint Declaration on Strategic Partnership</i>	Ditandatangani
6	2005	Australia	Menawarkan untuk membantu pengamanan Selat Malaka melalui patroli udara	Pemimpin Angkatan Laut Australia Russ Shalders menyampaikan tawaran itu ketika Australia, Selandia Baru, Inggris, Malaysia dan Singapura sedang latihan perang tahunan pada September 2005 di Laut Cina Selatan dan di semenanjung Malaysia	Indonesia berkeberatan
7	2005	Jepang	Jepang melalui Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia menyatakan akan membantu pengamanan di Selat Malaka	Bantuan tersebut dalam rangka membantu pengamanan di Selat Malaka dari pembajakan, terorisme, dan perdagangan manusia	NS
8	2005	Jepang	Kesepakatan kerjasama dalam bidang maritim, fokus yang disepakati adalah kerjasama untuk memberantas tindak kejahatan di Selat Malaka terutama terhadap pembajakan	Muncul bersamaan pada 2 Juni 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Jepang, menandatangani naskah kesepahaman dengan PM Jepang, Junichiro Koizumi terkait kerjasama di bidang ekonomi, yaitu Economic Partnership Agreement (EPA) dan Strategic Investment Action Plan (SIAP).	Bantuan Kapal Jepang
9	2005	India	<i>Declaration on New Strategic Partnership</i>	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke India, 21-24 November 2005, telah ditandatangani.	Ditandatangani Presiden

10	2006	Amerika Serikat	<i>Proliferation Security Initiative (PSI)</i>	Selanjutnya, pada 31 Mei 2003, Presiden AS George Bush meluncurkan <i>Proliferation Security Initiative (PSI)</i> di Krakow, Polandia	Tidak Ikut Serta
11	2006	Thailand	Kerjasama Maritim di Selat Malaka	Disampaikan melalui kunjungan Komandan Skuadron Fregat Angkatan Laut Kerajaan Thailand Laksamana Muda Thanarat Ubol ke Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) TNI AL di Jakarta	Belum Terlaksana
12	2006	Cina	Kerjasama Teknologi Pertahanan RI-Cina	Delegasi pertahanan Cina datang ke Departemen Pertahanan untuk merintis kesepakatan tentang kerjasama tersebut	Dalam proses peninjauan
13	2006	Jepang	ReCAAP	Indonesia juga masih belum menerima tawaran kesepakatan kerjasama regional pertama untuk melawan pembajakan dan perompakan bersenjata yang digagas Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi pada tahun Oktober 2001	Indonesia berkeberatan
14	2006	India	<i>Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Cooperative Activities in the Field of Defence</i>	Kerjasama ini disahkan dalam UU No. 21/2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah India tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan yang mulai berlaku efektif pada 29 Desember 2006.	Ratifikasi
15	2006	Amerika Serikat	Amerika Serikat sebagai <i>user state</i> memberikan perangkat sistem peringatan dini (<i>early warning</i>) untuk mendukung pengamanan di Selat Malaka yang dilakukan oleh tiga negara pantai yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura.	Perangkat peringatan dini itu dipasang di beberapa titik di sepanjang wilayah RI di Selat Malaka, dan akan dipasangkan pula di kapal patroli maritim (maritime patrol aircraft-MPA).	Radar IMSS
16	2007	Thailand	Membantu pengamanan di Selat Malaka	Keinginan Thailand untuk membantu pengamanan di Selat Malaka juga pernah disampaikan pemerintah Thailand pada pertemuan Panglima Bersenjata Thailand dan Panglima TNI di Thailand pada Maret 2007	Belum Terlaksana

17	2008	Thailand	Patroli Terkoordinasi	September 2008, Thailand baru bisa bergabung dalam pengamanan bersama Selat Malaka dalam bentuk patroli terkoordinasi dengan <i>liitoral state</i>	Terlaksana
18	2008	Korea Selatan	Kemitraan strategis bidang pertahanan kepada Indonesia	Korsel melalui Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Jung OK-Keun menawarkannya, untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin lama, terutama antara angkatan bersenjata kedua pihak. Bentuknya <i>Navy to Navy Talks</i> (NTNT), meliputi bidang latihan, pendidikan, teknologi, tukar menukar informasi dan kunjungan personel	Terlaksana

Secara keseluruhan, dari semua tawaran yang datang cukup menimbulkan pro dan kontra, terutama tawaran yang diusung AS.¹⁸⁷ *Proliferation Security Initiative* yang diusung AS paling menyita perhatian. Namun, tawaran kerjasama yang datang pada Indonesia sebelum PSI juga perlu untuk diuraikan, mengingat tawaran tersebut tidak hanya sekali dua kali ditujukan pada Indonesia.

Dengan tidak ikut sertanya Indonesia ke dalam PSI sebagai salah satu bentuk pengamanan di Selat Malaka, maka Indonesia telah melakukan *bandwagoning*. Menurut Waltz, *bandwagoning* merupakan lawan dari *balancing*, yang berarti bahwa *bandwagoning* lebih memilih bergabung bersama koalisi yang lebih kuat. Tentunya, dalam hal ini Indonesia telah menolak untuk bergabung dengan kekuatan yang ada di dalam PSI, terutama dalam hal ini adalah AS. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia menolak adanya campur tangan AS dalam pengamanan di Selat Malaka.

Adanya UNCLOS 1982 sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pengamanan di Selat Malaka tidak membuat Indonesia terpikirkan untuk melakukan *bandwagoning* dengan AS atau negara kuat lainnya. Lebih lanjut,

¹⁸⁷ Lihat Marsetio, MM, Laksamana Pertama TNI dalam *Monografi Isu Keamanan Maritim Kontemporer* yang disampaikan pada Orasi Ilmiah Penutupan Pendidikan Dikreg Seskoal Angkatan XLV. Bumi Cipulir. 7 November 2007. Hal 15.

Waltz menjelaskan bahwa biasanya ada dua motivasi bagi negara ketika melakukan *bandwagoning*. Pertama *bandwagoning* dilakukan sebagai sebuah bentuk ketentraman (*appeasement*) dengan beraliansi berkoalisi pada negara/pihak yang mengancam, maka negara pelaku *bandwagoning* berharap dapat menghindari serangan yang ditujukan bagi dirinya dengan mengalihkannya ke pihak lain.¹⁸⁸ Hal tersebut dilakukan dengan harapan negara pelaku *bandwagoning* dapat melindungi dirinya sendiri dari serangan. Dalam hal ini *bandwagoning* digunakan untuk alasan *defensive* dengan arti untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman yang datang. Selain itu, dengan bergabung bersama pihak yang lebih kuat, masing-masing negara berharap mendapat keuntungan dimana *bandwagoning* digunakan untuk alasan *offensif* dalam arti untuk mendapatkan wilayah kekuasaan.¹⁸⁹

Melihat dari berbagai bentuk strategi pertahanan yang dilakukan Indonesia di Selat Malaka selama periode 2006 hingga 2008, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia berusaha untuk berada di sisi *balancing* atau *bandwagoning*. Strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka berupa dalam bentuk mengumpulkan segenap kekuatan yang ada di sekitarnya, tentunya dalam hal ini menjalin kerjasama dengan *littoral state*, dan juga menerima bantuan teknis dari berbagai negara besar. Indonesia memilih untuk berada di tengah-tengah.

Menurut Evelyn Goh, Strategi yang dilakukan Indonesia tersebut, dapat digolongkan ke dalam strategi *hedging*. Lebih lanjut Goh menjelaskan, bahwa *hedging* merupakan satu set strategi yang bertujuan untuk menghindari (atau direncanakan sebagai suatu hal yang kebetulan) sebuah situasi dimana negara tidak dapat memutuskan untuk melakukan alternatif selain *balancing*, *bandwagoning* atau bersikap netral.¹⁹⁰ Sebaliknya negara memilih berada di tengah-tengah atau menghindari untuk memilih berada di sisi lainnya. Goh

¹⁸⁸ Stephen M. Walt. Spring. 1985. *Alliance Formation and the Balance of World Power*. International Security Vol 9 No. 4. MIT Press. Hal 7.

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center. Hal 2.

melalui studinya berargumen bahwa perilaku *hedging* di Asia Tenggara terdiri dari tiga elemen.¹⁹¹

Elemen pertama yaitu *indirect balancing* (*soft balancing*) yang merupakan kebijakan yang diciptakan untuk menghadapi kemampuan negara lawan dengan membatasi sebuah negara, baik itu dilakukan melalui *non-specific deterrence*, penguatan pertahanan, maupun membangun hubungan diplomatik, ekonomi, dan politik dengan negara ketiga, atau organisasi yang dapat menjadi pendukung negara ketika hubungan dengan lawan menjadi buruk.¹⁹² Kedua, *hedging* memerlukan *engagement* yang kompleks dengan China pada tingkat politik, ekonomi, dan strategi dengan harapan pemimpin China dapat dipengaruhi atau disosialisasikan untuk mematuhi peraturan dan norma-norma internasional. Kebijakan *engagement* berusaha mengembangkan ikatan politik dan ekonomi dengan sebuah negara dan membawanya pada masyarakat internasional, sehingga mengubah preferensi dan aksi para pemimpin pada kecenderungan yang lebih damai.¹⁹³

Ketiga, *hedging* merupakan sebuah kebijakan umum akan *enmeshing* (mengumpulkan) kekuatan besar di regional dalam rangka mendirikan sebuah stabilitas tatanan regional. Semua pemikir mengatakan bahwa Asia Tenggara melakukan *hedging* terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dominasi atau hegemoni China, penarikan diri Amerika dari kawasan ini, dan ketidakstabilan tatanan di kawasan.

Oleh karena itu, sejalan dengan apa yang diuraikan Goh bahwa apa yang dilakukan Indonesia merupakan sebagai tindakan yang bukan *balancing* atau *bandwagoning*, melainkan *hedging*.¹⁹⁴ Indonesia lebih memilih untuk menghindari dari setiap ajakan kerjasama pertahanan di Selat Malaka yang datang dari luar *littoral state*, terutama dalam bentuk gelar militer, termasuk terhadap *Proliferation Security Initiative*. Bahkan, Indonesia melakukan sebaliknya, yaitu dengan berada di tengah-tengah atau menghindari memilih berada di sisi lainnya.

¹⁹¹ *Ibid.* Hal 3-4.

¹⁹² Evelyn Goh. 31 Agustus 2006. *Understanding "hedging" in Asia-Pacific Security*. Pacific Forum CSIS: Honolulu, Hawaii.

¹⁹³ Johnston dan Ross (1999) dalam Kong dalam Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center. Hal 3.

¹⁹⁴ Evelyn Goh. 2005. *Opcit.* Hal 2.

Indonesia lebih memilih untuk menghimpun kekuatan besar di kawasan mulai dari *littoral state*, termasuk bantuan China, Jepang, dan juga dari AS. Lebih lanjut, Goh menyebut tindakan yang dilakukan Indonesia sebagai *hedging* dalam bentuk *enmeshing* berupa (mengumpulkan) kekuatan besar di regional dalam rangka mendirikan sebuah stabilitas tatanan regional, termasuk dalam hal ini di Selat Malaka. Hal yang dilakukan Indonesia tersebut juga sejalan dengan UNCLOS 1982, bahwa hanya tiga negara berdaulat yang berhak terhadap pengamanan di Selat Malaka. Oleh karena itu, selama periode 2006 hingga 2008, Indonesia giat melakukan kerjasama pertahanan dengan *littoral state*, yaitu Singapura dan Malaysia, terutama dalam bentuk patroli terkoordinasi.

3.3 Kesimpulan

Pada umumnya, kapabilitas militer Indonesia selama kurun waktu 2006-2008 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selama kurun waktu tersebut, kapabilitas militer Indonesia dalam hal *manpower* tidak mengalami perubahan. Di sisi lain, anggaran pertahanan Indonesia meningkat pada tahun 2007 dan kembali menurun pada 2008. Anggaran pertahanan Indonesia yang demikian juga belum mampu mengimbangi kebutuhan anggaran pertahanan yang meningkat setiap tahunnya, terutama untuk alokasi pada matra laut.

Tentu hal ini berimbas juga pada anggaran dalam pemeliharaan, perbaikan dan penggantian alat utama sistem persenjataan yang menurun setiap tahunnya. Selain itu, kondisi *manpower* Indonesia yang tidak mengalami perubahan baik secara kualitas dan kuantitas selama periode 2006 hingga 2008 turut mencerminkan bahwa Indonesia tidak berusaha meningkatkan *power*-nya melalui peningkatan kapabilitas militer. Dimana dalam hal ini Indonesia tidak melakukan *balancing*. Di sisi lain, meski kapabilitas militer Indonesia belum mampu mengamankan Selat Malaka secara meyeluruh, tapi tidak membuat Indonesia untuk turut serta ikut PSI. Selain bertentangan dengan UNCLOS 1982, menurut Indonesia, PSI juga dapat melanggar kedaulatan masing-masing negara pantai.

Akan tetapi, berbagai macam peningkatan gelar operasi yang dilakukan oleh Indonesia, maupun bersama dengan dua *littoral state* lainnya menunjukkan bahwa Indonesia tidak melakukan *bandwagoning*. Dalam hal ini Indonesia, tidak

melakukan kerjasama pertahanan di Selat Malaka dengan negara besar dari blok barat, terutama AS. Hal ini diperkuat dengan penolakan Indonesia terhadap *Proliferation Security Initiative*.

Selain itu, Indonesia juga tidak melakukan kerjasama pertahanan dalam bentuk gelar kekuatan militer dengan negara-negara besar di kawasan, seperti Cina, Jepang dan Korea Selatan. Kerjasama yang dijalin Indonesia dengan negara-negara besar tersebut hanya dalam bentuk bantuan teknis.

Sebaliknya, keterbatasan kapabilitas militer yang dimiliki Indonesia justru membuatnya untuk semakin mempererat dan meningkatkan kerjasama pertahanan di Selat Malaka dengan Singapura dan Malaysia sebagai *littoral state*. Selain, itu Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Thailand dan India dalam bentuk patroli terkoordinasi. Melalui hal tersebut dapat dilihat adanya upaya dari Indonesia untuk mengumpulkan kekuatan besar, terutama di kawasan regional sebagai bentuk untuk meningkatkan keamanan Selat Malaka tanpa menginternasionalisikannya. Strategi pertahanan yang dipilih Indonesia tersebut dapat dikategorikan sebagai *hedging* melalui *enmeshing*.